

**PERAN KOMUNIKATOR PEMBANGUNAN DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PROGRAM KOTAKU DI DESA AEK TUHUL
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Magister Sosial (M.Sos)
Dalam Bidang Komunikasi Penyiaran Islam**

**OLEH :
NURHALIMAH NASUTION**

NIM. 2150400010

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023

**PERAN KOMUNIKATOR PEMBANGUNAN DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PROGRAM KOTAKU DI DESA AEK TUHUL
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Magister Sosial (M.Sos)
Dalam Bidang Komunikasi Penyiaran Islam**

**OLEH :
NURHALIMAH NASUTION
NIM. 2150400010**

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

**Dr. Mohd. Rafiq, S.Ag., M.A
NIP.196806111999031002**

**Dr. Anas Habibi Ritonga, M.A
NIP. 198404032015031004**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Tesis Berjudul : PERAN KOMUNIKATOR PEMBANGUNAN
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PROGRAM KOTAKU DI DESA AEK TUHUL
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Yang disusun oleh

**Nama : NURHALIMAH NASUTION
NIM : 2150400010
Jenjang : Magister
Program Studi : Komunikasi Dan Penyiaran Islam**

Dinyatakan bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan untuk selanjutnya dapat diujikan dalam sidang munaqasyah.

Padangsidempuan, 2023

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Mohd. Rafiq, S.Ag., M.A
NIP.196806111999031002


Dr. Anas Habibi Ritonga, M.A
NIP. 198404032015031004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 KodePos 22733

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH TESIS

Nama : NURHALIMAH NASUTION
NIM : 2150400010
Program Studi : Komunikasi Dan Penyiaran Islam
Judul Tesis : PERAN KOMUNIKATOR PEMBANGUNAN
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PROGRAM KOTAKU DI DESA AEK TUHUL
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
BATUNADUA KOTA PADANGSIDIMPUAN

No Nama Tanda Tangan

1. Dr. Icol Dianto, M.Kom.I
(Ketua/Penguji Bidang Umum)

2. Dr. Moh. Rafiq, M.A
(Sekretaris/Penguji Isi dan Bahasa)

3. Dr. Ali Sati, M.Ag
(Anggota/Penguji Bidang Utama)

4. Dr. Anas Habibi Ritonga, M.A
(Anggota/Penguji Kompetensi Utama)

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah Tesis

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 20 Nopember 2023
Pukul : 14.00 sampai selesai
Hasil/Nilai : 83.75/A



SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NURHALIMAH NASUTION**
NIM : **2150400010**
Jenjang : **Magister**
Progam Studi : **Komunikasi Dan Penyiaran Islam**
Judul Tesis : **PERAN KOMUNIKATOR PEMBANGUNAN DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM
KOTAKU DI DESA AEK TUHUL KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA KOTA
PADANGSIDIMPUAN**

Dengan *ini* menyatakan bahwa saya menyusun tesis sendiri tanpa ada bantuan yang tidak sah dari pihak lain. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.



Padangsidiimpuan,

2023

NURHALIMAH NASUTION
NIM. 2150400010

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NURHALIMAH NASUTION**
NIM : **2150400010**
Jenjang : **Magister**
Progam Studi : **Komunikasi Dan Penyiaran Islam**
Judul Tesis : **PERAN KOMUNIKATOR PEMBANGUNAN
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PROGRAM KOTAKU DI DESA AEK TUHUL
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak secara ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpun, 2023



UNIVERSITAS ISLAM PADANG
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
NURHALIMAH NASUTION
NIM. 2150400010

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NURHALIMAH NASUTION**
NIM : **2150400010**
Jenjang : **Magister**
Program Studi : **Komunikasi Dan Penyiaran Islam**
Judul Tesis : **PERAN KOMUNIKATOR PEMBANGUNAN
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PROGRAM KOTAKU DI DESA AEK TUHUL
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
BATUNADUA KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Dengan ini menyetujui untuk memberikan izin **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif** kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan atas karya tesis yang berjudul: **PERAN KOMUNIKATOR PEMBANGUNAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM KOTAKU DI DESA AEK TUHUL KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA KOTA PADANGSIDIMPUAN.**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih-media atau memformatkan dan mengelolanya dalam pangkalan data (data base), mendistribusikan dan menampilkannya atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis karya ilmiah tersebut, saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam Karya Ilmiah tersebut.

Padangsidempuan,

2023



NURHALIMAH NASUTION
NIM. 2150400010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 KodePos 22733

PENGESAHAN DIREKTUR PASCASARJANA

Nomor : **33** /Un.28/AL/PP.00.9/01/2024

Judul Skripsi : **PERAN KOMUNIKATOR PEMBANGUNAN
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PROGRAM KOTAKU DI DESA AEK TUHUL
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
BATUNADUA KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Ditulis Oleh : **NURHALIMAH NASUTION**
NIM : **2150400010**
Program Studi : **Komunikasi Dan Penyiaran Islam**

Telah Dapat diterima Sebagai salah satu tugas guna
memperoleh gelar Magister Sosial (M.Sos)
Dalam Bidang Komunikasi Dan Penyiaran Islam

Padangsidimpuan, 15 Januari 2024
Direktur Pascasarjana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP 19680704 200003 1 003

ABSTRAK

NAMA : Nurhalimah Nasution
NIM : 2150400010
Fakultas/Prodi : Pasca sarjana/KPI
Judul Tesis : Peran Komunikator Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat Program Kotaku di Desa Aek Tuhul Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan

Latar belakang masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana peran komunikator pembangunan dalam pemberdayaan program KOTAKU mampu meningkatkan kualitas hidup lebih baik dalam memberdayakan masyarakat, melihat tujuan KOTAKU dalam mengentaskan kemiskinan melalui beberapa indikator dalam program kotaku namun realitanya masih ada kemiskinan serta pola hidup mereka yang belum meningkat, masih besar persentasi angka kemiskinan di Kota Padangsidempuan.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran komunikator pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat program Kotaku dalam memberdayakan Badan Keswadayaan Masyarakat, berpartisipasi dalam menuntaskan kumuh di Desa Aek Tuhul Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan secara murni dan apa adanya. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu komunikator (Fasilitator lapangan dan Aparat Desa), peneliti mengambil 4 orang perwakilan dari Fasilitator. Sedangkan data sekunder yaitu pengurus BKM, buku pedoman program kotaku dan youtube internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian diperoleh bahwa peran komunikator pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat program Kota Tanpa Kumuh dalam Memberdayakan Masyarakat untuk mengentaskan permukiman kumuh berjalan dengan baik. Dibuktikan dengan partisipasi masyarakat aktif bila ada kegiatan di lapangan. Serta sistem infrastruktur dan sanitasi lingkungan yang dilakukan program KOTAKU bisa mengurangi kumuh dan memberdayakan sosial masyarakat sehingga mampu berkolaborasi dalam mengentaskan permukiman kumuh melalui pembangunan jalan, sanitasi dan adanya pinjaman bergulir lima juta rupiah (5.000.000,-) untuk satu kelompok ada lima orang dengan jangka waktu sepuluh bulan harus sudah lunas pinjaman. Peran komunikator dalam Program KOTAKU yakni mengentaskan kemiskinan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, melalui pelatihan – pelatihan seperti pelatihan pengolahan ubi dari dinas koperasi Kota Padangsidempuan sehingga mampu berkolaborasi dalam mengentaskan pemukiman kumuh di Desa Aek Tuhul dalam program KOTAKU

Kata kunci : Peran Komunikator, pemberdayaan masyarakat, Program Kotaku

ABSTRACT

Name : Nurhalimah Nasution
Reg. Number : 2150400010
Faculty/ Study Program : Postgraduate/ Islamic Broadcasting Communications
Title : The Role of Development Communicators in
Community Empowerment Kotaku Program in Aek
Tuhul Village, Padangsidempuan Batunadua District,
Padangsidempuan City

The background to the problem of this research is how the role of development communicators in empowering the KOTAKU program is able to improve the quality of life better by empowering the community, looking at KOTAKU's goal of alleviating poverty through several indicators in the Kotaku program, but in reality there is still poverty and their lifestyle has not improved, There is still a large percentage of poverty in Padangsidempuan City.

The aim of this research is to determine the role of development communicators in the Kotaku community empowerment program in empowering Community Self-Reliance Bodies, participating in eliminating slums in Aek Tuhul Village, Padangsidempuan Batunadua District, Padangsidempuan City.

The research method used is descriptive qualitative which aims to describe the actual situation in the field purely and as it is. Data sources consist of primary data sources and secondary data sources. Primary data sources are communicators (field facilitators and village officials), researchers took 4 representatives from the facilitators. Meanwhile, secondary data includes BKM administrators, Kotaku program manuals and YouTube internet. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation.

The research results showed that the role of development communicators in community empowerment in the City Without Slums program in Empowering Communities to eradicate slum settlements was going well. This is proven by active community participation when there are activities in the field. As well as the infrastructure and environmental sanitation systems implemented by the KOTAKU program can reduce slums and empower the social community so that they are able to collaborate in alleviating slums through road construction, sanitation and the existence of a revolving loan of five million rupiah (5,000,000,-) for a group of five people with within ten months the loan must be paid off. The role of communicators in the KOTAKU Program is to alleviate poverty by meeting community needs, through training such as training on processing sweet potatoes from the Padangsidempuan City cooperative department so that they are able to collaborate in alleviating slum settlements in Aek Tuhul Village in the KOTAKU program.

Keywords: Role of Communicator, community empowerment, Kotaku Program

خلاصة

اسم	: نورحليمة ناسوتيون
رقم	: ٢١٥٠٤٠٠٠١٠٠
برنامج الدراسة	: اتصالات الإذاعة الإسلامية
عنوان	: دور الاتصالات التتموية في تمكين المجتمع، برنامج كوتاكو في قرية إيك توهول، منطقة بادانجسيديمبوان باتونادوا، مدينة بادانجسيديمبوان

خلفية مشكلة هذا البحث هي كيف أن دور الاتصالات التتموية في تمكين برنامج كوتاكو قادر على تحسين نوعية الحياة بشكل أفضل من خلال تمكين المجتمع، بالنظر إلى هدف كوتاكو المتمثل في التخفيف من حدة الفقر من خلال عدة مؤشرات في برنامج كوتاكو، ولكن في الواقع لا يزال هناك فقر ولم يتحسن أسلوب حياتهم، ولا تزال هناك نسبة كبيرة من الفقر في مدينة بادانجسيديمبوان.

الهدف من هذا البحث هو تحديد دور الاتصالات التتموية في برنامج تمكين مجتمع كوتاكو في تمكين هينات الاعتماد على الذات المجتمعية، والمشاركة في القضاء على الأحياء الفقيرة في قرية إيك توهول، منطقة بادانجسيديمبوان باتونادوا، مدينة بادانجسيديمبوان.

منهج البحث المستخدم هو وصفي نوعي يهدف إلى وصف الوضع الفعلي في المجال بشكل خالص وكما هو. تتكون مصادر البيانات من مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. مصادر البيانات الأولية هي القائمون على الاتصال (الميسرون الميدانيون ومسؤولو القرية)، وقد أخذ الباحثون ٤ ممثلين من الميسرين. وفي الوقت نفسه، تتضمن البيانات الثانوية مسؤولي وكالة الرفاهية العامة وأدلة برنامج كوتاكو وإنترنت موقع. وكانت تقنيات جمع البيانات المستخدمة هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق.

أظهرت نتائج البحث أن دور الاتصال التتموي في تمكين المجتمع في برنامج مدينة بلا عشوائيات في تمكين المجتمعات من القضاء على المستوطنات العشوائية يسير بشكل جيد. وقد ثبت ذلك من خلال المشاركة المجتمعية النشطة عندما تكون هناك أنشطة في الميدان. فضلا عن البنية التحتية وأنظمة الصرف الصحي البيئي التي ينفذها برنامج كوتاكو يمكن أن تقلل من الأحياء الفقيرة وتمكين المجتمع الاجتماعي حتى يتمكنوا من التعاون في تخفيف الأحياء الفقيرة من خلال بناء الطرق والصرف الصحي ووجود قرض متجدد بقيمة خمسة ملايين روبية (٥.٠٠٠.٠٠٠) لمجموعة من خمسة أشخاص في غضون عشرة أشهر يجب سداد القرض. يتمثل دور الاتصالات في برنامج كوتاكو في التخفيف من حدة الفقر من خلال تلبية احتياجات المجتمع، من خلال التدريب مثل التدريب على معالجة البطاطا الحلوة من الإدارة التعاونية لمدينة بادانجسيديمبوان حتى يتمكنوا من التعاون في التخفيف من مستوطنات الأحياء الفقيرة في قرية أيك توهول في برنامج كوتاكو.

الكلمات المفتاحية: دور التواصل، تمكين المجتمع، برنامج كوتاكو

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur selalu saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini penulis dapat menyelesaikan tesis yang merupakan studi akhir dalam menyelesaikan pendidikan Magister di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Tesis yang berjudul peran komunikator pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat program kotaku desa aek tuhul kecamatan padangsidempuan tenggara kota padangsidempuan, disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelas Magister Sosial (M.Sos) di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis banyak sekali mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik , Wakil Rektor Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Anhar, MA, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Ichwanuddin, M.Ag di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah merestui pembahasan tesis ini.

2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
3. Pembimbing I Bapak Dr. Mohd. Rafiq, S.Ag., M.A dan Pembimbing II Bapak Dr. Anas Habibi Ritonga, M.A yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan pada penyusunan tesis ini.
4. Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Bapak Dr. Icol Dianto, M.Kom.I beserta seluruh dosen dan civitas akademik yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.
5. Kepala Perpustakaan Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum serta pegawai perpustakaan yang telah memberi kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Keluarga besar Badan Ksewadayaan Masyarakat Aek Tuhul yang telah ikhlas memberikan izin dan data-data yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Teristimewa kepada keluarga tercinta suami (Nizamuddin Banurea), anak-anak (Imo Khairul Azmi Banurea, Kirana Rizky Niati Boru Banurea dan Sohna Fadillah Boru Banurea), Ayahanda (Usuluddin Nasution), Ibunda (Almh. Nuralina Nasution), Ayah Mertua (Alm. Sahrul Banurea), Ibu Mertua (Megawati Boru Padang) dan adik-adik (Zulfahri Nasution dan Zulfikar Nasution) yang tidak pernah lelah dan bosan serta tidak pernah berhenti memberikan bimbingan, arahan, bantuan, dorongan, do'a, dan material kepada penulis.

8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2021 Pascasarjana Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam.
9. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunianya serta balasan yang lebih atas budi baik yang telah diberikan. *Amin ya robbal alamin*

Padangsidempuan,
Penulis,

2023

Nurhalimah Nasution
Nim. 2150400010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	
DEWAN PENGUJI SIDANG TESIS	
SURAT PERNYATAAN PLAGIASI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
PENGESAHAN DIREKTUR PASCASARJANA	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	5
D. Batasan Istilah.....	5
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan Penelitian.....	7
G. Kegunaan Penelitian	7
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	9
1. Komunikator Pembangunan.....	9
a. Defenisi Komunikator Pembangunan	9
b. Peran komunikator Pembangunan.....	11
2. Partisipasi Masyarakat.....	13
3. Pemberdayaan Masyarakat	21
a. Defenisi Pemberdayaan Masyarakat	21
b. Aspek dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat.....	23
c. Bentuk dan Tipe Pemberdayaan Masyarakat	27
d. Pandangan Islam Tentang Pemberdayaan Masyarakat	28
4. KOTAKU (Kota tanpa Kumuh).....	34
a. Latar Belakang Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) .	34
b. Pengertian Pemberdayaan	36
c. Pengertian Program Kotaku	38
d. Tujuan Program Kotaku	41
e. Dasar Hukum Program KOTAKU	60
f. Prinsip Program KOTAKU	61
B. Penelitian Terdahulu	63

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	66
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	67
C. Subjek Dan Objek Penelitian.....	67
D. Sumber Data	68
E. Teknik Pengumpulan Data	69
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	72
G. Teknik Keabsahan Data	74
H. Kerangka Penelitian.....	75

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Aek Tuhul Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan	76
1. Profil Desa Aek Tuhul	76
2. Visi dan Misi Desa Aek Tuhul.....	77
3. Batas Deliniasi Kawasan Kumuh.....	78
4. Kondisi Penggunaan Lahan Existing	79
5. Kondisi Sosial Ekonomi	80
6. Data Kependudukan Dan Sebaran Penduduk	80
7. Peta existing Infrastruktur, sarana dan prasarana sosial dan ekonomi.....	82
8. Sarana Pelayanan Umum dan pemerintahan.....	87
9. Kondisi Rawan Bencana	89
10. Profil Permukiman dan Permukiman Kumuh.....	91
B. Gambaran Umum Program KoTaKu Padangsidempuan	97
1. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	98
2. Landasan Hukum	99
3. Tujuan Penyusunan Renstra.....	101
4. Susunan Perangkat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	101
5. Perangkat Daerah	103
6. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Program KOTAKU	107
7. Materi Program Kota Tanpa Kumuh	107
C. Temuan Khusus Penelitian	1s
1. Peran Komunikator Dalam Pemberdayaan Masyarakat Program Kotaku Desa Aek Tuhul Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan.....	109
2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Program Kotaku Desa Aek Tuhul Kecamatan Padangsidempuan	116
D. Analisis Hasil Penelitian.....	122
E. Keterbatasan Penelitian	125

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	126
B. Saran	127

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	64
Tabel 3.1	Waktu Dan Lokasi Penelitian	66
Tabel 4.1	Luas Wilayah Desa Aek Tuhul	76
Tabel 4.2	Penggunaan Lahan	80
Tabel 4.3.	Sebaran Penduduk	81
Tabel 4.4	Struktur Penduduk Laki laki dan Perempuan	81
Tabel 4.5	Sebaran MBR	82
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Tahun 2020 ...	82
Tabel 4.7	Jaringan Jalan	83
Tabel 4.8	Jaringan Saluran Pembuangan Air Limbah	84
Tabel 4.9	Jaringan Saluran Pembuang Air Hujan (Drainase)	85
Tabel 4.10	Persampahan Kelurahan	86
Tabel 4.11	Sarana Pendidikan	87
Tabel 4.12	Sarana Kesehatan	87
Tabel 4.13	Sarana Peribadatan	88
Tabel 4.14	Sarana Perdagangan	88
Tabel 4.15	Ruang Terbuka Publik	89
Tabel 4.16	Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Padangsidempuan	93

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Penelitian.....	75
Gambar 4.1 Diagram Luas Wilayah Desa Aek Tuhul	76
Gambar 4.2 Peta Administrasi Desa Aek Tuhul	78
Gambar 4.3 Peta Lokasi Kumuh Desa Aek Tuhul	79
Gambar 4.4 Peta Jaringan Jalan Desa Aek Tuhul	83
Gambar 4.5 Peta Jaringan Pembuangan Air Limbah Desa Aek Tuhul	84
Gambar 4.6 Peta Drainase Desa Aek Tuhul	85
Gambar 4.7 Persampahan Desa Aek Tuhul	86
Gambar 4.8 Peta Rawan Bencana	91
Gambar 4.9 Pelaksanaan Pemilu Masyarakat sangat senang dengan adanya pemilihan anggota badan kesewadayaan Masyarakat Deas Aek Tuhul	111
Gambar 4.10 Pendampingan Tim Konsultan dalam Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Program Kotaku Desa Aek Tuhul Kec.PSP Batunadua	113
Gambar 4.11 Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat, peserta sangat senang dengan adanya pelatihan ini karna akan menambah ilmu bagi BKM	116
Gambar 4.12 tingginya partisipasi masyarakat bisa di lihat ketika di lakukan rapat sosialisasi	121

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Kota Tanpa Kumuh adalah kota yang layak huni produktif dan kota yang berkelanjutan, berkelanjutan” merupakan tujuan yang akan dicapai melalui program KoTaKu (Kota Tanpa Kumuh). Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut dilakukan serangkaian kegiatan di tingkat kabupaten/kota dan tingkat kelurahan/desa. Program KoTaKu diterjemahkan ke dalam dua kegiatan yaitu pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman, permukiman kumuh perkotaan yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif. Pendekatan tersebut mempertemukan perencanaan makro (*top-down*) dengan perencanaan mikro (*bottom-up*).¹

Program KoTaKu (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang di laksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Provinsi. Program kotaku ini akan jadi satu basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan program kotaku adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.²

¹ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, “*Petunjuk Pelaksanaan Program Kotaku*” tahun 2018 hal. 2

² <http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku>, “*Tentang Program Kotaku*”, Accessed April 4, 2021, diunggah pada 19 Februari 2023, pkl. 09.00 WIB.

Pemerintah daerah kota Padangsidempuan sudah menangani permukiman kumuh dengan berbagai macam ide yang akan samakan dengan kondisi dan karakter wilayahnya. Salah Satu modl penanganan permukiman kumuh dengan adanya penataan berbasis kawasan yang mengintegrasikan lingkungan kumuh dan permukiman di sekitar Kawasan yang ada satu lingkungan, artinya mengintegrasikan dengan kegiatan permukiman di sekitarnya (sistem kota) baik Kegiatan ekonomi, Lingkungan sosial maupun infrastruktur lingkungan.³

Perencanaan yang seperti ini, bisa menjadikan satu Kawasan lingkungan permukiman yang akan menjadi kumuh secara berkelanjutan dan akan mendukung dengan potensi-potensi perkembangan yang ada lingkungan semakin sedikit. Sehingga akan ada upaya yang dilakukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan faktor kehidupan masyarakat (sosial) adalah dari segi ekonomi, pemerintah menggunakan fasilitator sebagai pemberdaya di masyarakat.

Peran pemberdaya disini adalah sebagai komunikator yang merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang didalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan agar masyarakat bisa menerima program kotaku secara sukarelawan tanpa ada paksaan, maka ada tahapan yang harus dilewati seperti tahapan persiapan dimana komunikator adalah konsultan pendamping harus bisa membentuk lembaga namanya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang akan bertanggung jawab yang berjumlah 9 (Sembilan) orang dan harus dari warga Aek Tuhul.⁴

³Arief Rahadi ”<http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku>”, “*Tentang Program Kotaku*”, Accessed April 4, 2021, diunggah pada 19 Februari 2023, pkl. 09.00 WIB.

⁴J. Wahyu Kusumosusanto “Buku saku Penyelenggara swakelola *Kotaku*”, diterbitkan

Desa Aek Tuhul menjadi pilihan peneliti karena masyarakat desa Aek Tuhul sangat aktif ketika kita buat rapat, partisipasi tinggi, lancar dalam pengelolaan ekonomi bergulir dan mendapatkan bantuan rumah produksi dari pusat dalam hal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di sana, yang awalnya ibu rumah tangga tidak punya pekerjaan setelah ada program kotak ibu rumah tangga disana bisa ikut bergabung dalam pengolahan keripik ubi yang di dampingi oleh tim pendamping.

Komunikator menurut Liliweri ialah seseorang atau lembaga sebagai penyampai pesan secara langsung atau tidak langsung kepada khalayak, komunikator berperan sebagai sumber informasi atau sumber pesan, sedangkan fungsi dasar komunikasi menurut Liliweri adalah Pendidikan dan pengajaran, informasi, hiburan, diskusi dan persuasi.⁵

Dijelaskan juga bahwa sebelum masuk komunikator pembangunan program KoTaKu di desa Aek Tuhul maka permukiman di sana masih kumuh dimana kita lihat jalan banyak yang rusak, drainase sering banjir karena masyarakat buang sampah langsung ke drainase sehingga bila hujan akan terjadi genangan, tapi setelah program kotaKu masuk di desa Aek Tuhul alhamdulillah komunikator bisa memberikan penyuluhan pentingnya menjaga kebersihan dan mulailah disosialisasikan adanya pembangunan permukiman kumuh berdasarkan kebutuhan prioritas masyarakat.

Keterlibatan masyarakat langsung dalam kegiatan program KoTaKu

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, 2022, hal.15-16.

⁵ Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hal. 48.

menjadikan masyarakat desa Aek Tuhul mempunyai pekerjaan, begitu juga dengan lingkungannya yang semakin bersih, jalan semakin bagus sesuai dengan tujuan program Kota Tanpa Kumuh yakni mengurangi luas kawasan permukiman kumuh, memperbaiki akses untuk infrastruktur dan pelayanan dasar di lingkungan kumuh perkotaan agar bisa mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Selanjutnya terbentuk kelompok kerja perumahan Kawasan dan permukiman (Pokja PKP) dan bisa menaikkan perekonomian masyarakat baik di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan kumuh yang akan berguna dengan baik. Sehingga dokument perencanaan penanganan kumuh tingkat kota maupun tingkat masyarakat yang tersusun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Menambahnya pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui tersedianya pembangunan fisik infrastruktur dan kegiatan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat agar mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan lingkungan kumuh. Supaya terjadi aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih sehingga masyarakat sehat dan pencegahan kumuh.⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi Aek Tuhul dengan judul penelitian”
**PERAN KOMUNIKATOR PEMBANGUNAN DALAM PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT PROGRAM KOTAKU DI DESA AEK TUHUL KECAMATAN**

⁶Arief Rahadi” <http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku>, “*Tentang Program Kotaku*”, Accessed April 4, 2021, diunggah pada 19 Februari 2023

PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA KOTA PADANGSIDIMPUAN.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aparat desa Aek Tuhul kurang mampu berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat.
2. Masyarakat di desa Aek Tuhul kurang mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat.

C. Batasan Masalah

Karena faktor atau variabel yang berkaitan dengan fokus masalah cukup banyak, maka diperlukan batasan masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran komunikator pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat pada program kegiatan KoTaKu.
2. Fokus penelitian masalah ini dilakukan di desa Aek Tuhul kecamatan Padangsidempuan, Batunadua kota Padangsidempuan.

D. Batasan Istilah

Agar menghindari terjadinya kesalahpahaman istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti membuat batasan sebagai berikut ini:

1. Peran adalah keikutsertaan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.⁷ Peranan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran komunikator pembangunan dalam pemberdayaan

⁷ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. 10), Jakarta: Balai Putaka, 1999, hal. 436.

masayarakat program KoTaKu di desa Aek Tuhul.

2. Komunikator adalah seseorang atau kelompok yang menyampaikan pesan kepada komunikan.⁸ Komunikator yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Para Pendamping lapangan dan para aparaturnya di desa Aek Tuhul.
3. Pemberdayaan adalah proses cara melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak.⁹ Pemberdayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat desa Aek Tuhul.
4. Program kotaku adalah salah satu program pemerintah pusat bidang direktorat pengembangan Kawasan permukiman, dalam rangka meningkatkan peran masyarakat untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam percepatan penanganan lingkungan kumuh di perkotaan pada tahun 2016-2020.¹⁰ Program kotaku yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah program KoTaKu kota Padangsidimpuan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ada, maka rumusan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran komunikator pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Aek Tuhul kecamatan Padangsidimpuan Batunadua kota Padangsidimpuan?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan program KoTaKu desa Aek Tuhul kecamatan Padangsidimpuan Batunadua kota Padangsidimpuan?

⁸ Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar* ,,,,,, hal. 215.

⁹ Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar* ,,,,,, hal. 328.

¹⁰ <http://definisi-program-kotaku>, diakses pada hari Rabu, 12 April 2023, pukul 23.49

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui peran komunikator dalam pemberdayaan masyarakat desa Aek Tuhul kecamatan Padangsidempuan Batunadua kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat dalam program kotaku desa Aek Tuhul kecamatan Padangsidempuan Batunadua kota Padangsidempuan.

G. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini bisa di bagi ke dalam 2 kelompok manfaat yaitu manfaat akademis dan manfaat praktik. Adapun manfaat yang akan didapat dalam tiap bidang adalah:

1. Manfaat pada akademik Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, karena dalam penelitian ini akan dilakukan tambahan kajian tentang ilmu pengetahuan dan menjadi bahan kajian tentang ilmu dan akan menambah referensi yang berkaitan dengan pemberdayaan khusus bagi peneliti lanjutan yang akan focus mengkaji tentang strategi peningkatan peran masyarakat.
2. Manfaat untuk pemerintah daerah, memberikan masukan pemikiran kepada pemerintah kota padangsidempuan sebagai dasar pertimbangan dan rekomendasi untuk program pembangunan yang berbasis strategi pengembangan masyarakat agar penanganan kumuh bisa teratasi baik dengan adanya peningkatan ekonomi dari yang tidak berdaya jadi berdaya sehingga dapat mandiri masyarakat yang ada di kota Padangsidempuan khususnya di

desa Aek Tuhul kecamatan Padangsidempuan Batunadua Padangsidimpuan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Komunikator Pembangunan

a. Defenisi Komunikator Pembangunan

Komunikasi pembangunan adalah upaya organisasi untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi, biasanya menggunakan proses komunikasi dan media, seperti banyak dilakukan pada negara-negara berkembang. Komunikasi pembangunan dapat terjadi disemua tingkatan, mulai kyalayak bawah hingga pemerintah dan negara, dan termasuk narasumber dan musyawarah kelompok di lembaga resmi. Oleh karena itu, pengembangan komunikasi pembangunan ialah inovasi dialami rakyat lewat jalan komunikasi. Komunikasi pembangunan ialah ilmu dan praktik komunikasi di negara yang sedang maju, pertamaaktifitas komunikasi akan peralihanbaik yang terencana. Komunikasi pembangunan bertujuan buat mempromosikan perkembangan manusia. Memprioritaskan komunikasi.

Teori merupakan serangkaian konsep atau definisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena.¹¹ Gambaran sistematis ini dijabarkan dan dihubungkan antara variable yang satu dengan variabel yang lainnya dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena atau permasalahan yang ada.

Komunikator merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila

¹¹ Tim penyusun departemen Pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar Bahasa indonesia*, Jakarta: balai pustaka, 1990, hal. 181

seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut akan melakukan perannya sebagai fasilitator. Para ahli berpendapat seperti Poerwadarminata beliau mengatakan bahwa komunikator ialah suatu tindakan yang dilakukan dengan dinamis dan sesuai dengan status dan kedudukan yang di sandang. Kedudukan dan status harus sesuai dengan peraturan dan tindakan tidak boleh ada peran yang berbeda.¹²

Di kutip dari pendapat Soekanto peran adalah suatu proses yang dinamis kedudukannya maupun statusnya. Ketika kita melakukan hak dan kewajiban maka harus sesuai dengan kedudukan seseorang, dan orang itu akan menjalankan satu peranan, adapun perbedaan antara peranan dan kedudukan ialah peranan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dua-duanya tidak bisa di pisahkan karena satu sama lain saling bergantung begitupun dengan sebaliknya.

Pendapat made pidarta dalam buku siti irene astuti D. komunikator dalam pengembangan lingkungan adalah harus bisa melibatkan seseorang maupun beberapa orang dalam satu kegiatan, keterlibatan disini bisa berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala daya kemampuan yang di milikinya dalam semua urusan baik yang di laksanakan untuk mendukung pencapaian suatu tujuan dan tanggung jawab.

¹² Tim penyusun departemen Pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar* ,,,, hal. 157.

b. Peran komunikator Pembangunan

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹³ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*” artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁴

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status).

Apabila seorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kamus bahasa Indonesia juga

¹³ Departemen Pendidikan nasional, kamus besar Bahasa Indonesia edisi keempat, Jakarta Gramedia pustaka utama, 2014, hal. 121.

¹⁴ Torang Syamsir, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014, hal. 86.

dijelaskan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan. Seorang komunikator tidak hanya berperan dalam menyampaikan pesan kepada penerima, namun juga memberikan tanggapan, serta menjawab pertanyaan dan masukan yang disampaikan oleh penerima dan publik yang terkena dampak dari proses komunikasi yang berlangsung, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri.¹⁵

Dikutip dari Isbandi peran komunikator untuk masyarakat adalah sebagai upaya keikutsertaan masyarakat untuk bisa mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang ada di sekitar masyarakat, pengambilan keputusan dan pemilihan tentang bagaimana solusi untuk menangani permasalahan baik ketika pelaksanaan maupun ketika mengatasi permasalahan, maka masyarakat harus dilibatkan dalam proses mengambil kebijakan perubahan.¹⁶

Masyarakat yang di libatkan dalam mengambil keputusan akan meningkatkan kepercayaan public kepada penyelenggara maupun Lembaga

¹⁵ Nuruni dan Kustini, Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.7 (1).(2011), diakses pukul 21.00

¹⁶ Nuruni dan Kustini, Experiental Marketing, Emotional Branding.

pemerintah setempat. Demokrasi di negara berkembang seperti Indonesia akan terjadi situasi minimnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara maupun Lembaga pemerintah. Sehingga dengan adanya melibatkan masyarakat dalam pengambil kebijakan di harapkan kepercayaan public kepada pemerintah bisa meningkat, dngan meningkatnya kepercayaan masyarakat maka bisa di katakana sebagai indicator untuk menambah dukungan dan keabsahan pemerintah yang berkuasa.

Inilah salah satu factor keterlibatan masyarakat untuk pembangunan dan pelaksanaan program atau kegiatan proyek agar pembangunan yang di kerjakan masyarakat setempat punya ciri khas tersendiri yang baik dan partisipatif (artinya masyarakat bisa menalar baru berbuat), dengan adanya kesepakatan yang di lakukan oleh semua pihak yang terlibat maka kesepakatan tersebut akan ada pembagian tanggung jawab dan wewenang yang setara.

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa inggris yaitu dari kata “participation“ yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan

pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.¹⁷

Dalam pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi.

Menurut Simatupang memberikan beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut :

- a. Partisipasi juga adalah apa yang kita kerjakan bagian dari usaha bersama yang di lakukan secara bersama-sama yang punya tujuan bersama.
- b. Partisipasi juga adalah kata mupakat untuk bisa satu tujuan agar bisa sama-sama menjalankan amanah yang di berikan masyarakat sehingga bisa menjalankan pembangunan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila.
- c. Partisipasi dalam pembangunan adalah mendorong agar pembangunan yang baik dan bermartabat sehingga keadilan social dan keadilan nasional bisa kita memeliharanya agar alam di sekitar kita menjadi tempat hidup manusia untuk generasi akan datang.
- d. Partisipasi bisa juga untuk mengambil bagian dari perencanaan pembangunan dan pelaksanaan, sehingga partisipasi bisa memberikan sumbangan nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita keadilan social yang di junjung tinggi.¹⁸

Partisipasi masyarakat harapannya bisa memberikan yang terbaik kepada warga sehingga perencanaan sampai dengan pelaksanaan masyarakat terlibat langsung di lapangan maupun dalam forum rapat agar partisipasi bisa di lihat indicator keberhasilannya.

¹⁷ Edi Yuwono, . *Handbook Fisiologi Hewan. Fakultas Biologi. UNSOED. Purwakarta.* 2001, hal. 21

¹⁸ Edi Yuwono, . 2001. *Handbook Fisiologi,,,,,* hal. 21

Supaya keberhasilan partisipatif terwujud maka harus ada alternatif yang kreatif dan inovatif sehingga anggota masyarakat yang hadir dan terlibat langsung bisa bertanggung jawab kepada pekerjaannya dan sebagai masyarakat proses untuk memajukan suatu kampung akan banyak rintangan dan hambatan makanya perlu kerja sama yang baik dan sungguh-sungguh.

Partisipasi masyarakat dalam keterlibatan untuk pengambil keputusan dan bagaimana strategi di lapangan agar keterlibatan masyarakat meningkat maka perlu dibangun strategi oleh komunikator dengan cara selalu menghormati pendapat orang lain dan memberikan contoh yang baik kepada warga masyarakat.

Partisipasi yang peneliti maksud di desa aek tuhul adalah bagaimana masyarakat di sana bila di ajak rapat dan bergotong royong mereka mau dan ikut terlibat sehingga partisipasi di sana sangat baik, di buktikan bila ada pekerjaan di lapangan baik pembangunan maupun lainnya warga di sana sangat antusias dan siap terlibat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di artikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan. Ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan pembangunan dan ikut serta menikmati hasil-hasil pembangunan. ¹⁹

Konsep partisipasi dalam pembangunan sudah di munculkan pemerintah dari awal tahun 1980 an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat di harapkan agar mau berpartisipasi dalam menjaga lingkungan di

¹⁹ Agus Suryono, *Teori dan Isi Pembangunan. M alang: Universitas negeri malang. UM Press. 2001. hal. 52*

manapun mereka berada. Untuk mnsukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat maka pemerintah membentuk Lembaga-lembaga PKK, LKMD Dan karang taruna untuk menunjang solidaritas antara kebijakan pembangunan komunitas.²⁰

Partisipasi masyarakat dalam menerima hasil pembangunan dan menilai hasil partisipasi masyarakat adalah adanya keikut sertaan masyarakat dalam proses identifikasi dan menggali potensi yang ada di lingkungannya sehingga solusi dan alternative bisa dilihat dengan menilai hasil dari keterlibatan masyarakat.

Partisipasi yang di maksud peneliti disini adalah harapannya bisa memberdayakan masyarakat yang ada di kota padangsidimpuan khususnya di desa aek tuhil kecamatan padangsidimpuan tenggara kota padangsidimpuan agar mau terlibat dalam bidang apapun baik ketika rapat maupun ketika pelaksanaan kegiatan di lapangan agar pekerjaan ada yang mengevaluasi dan memonitoring sehingga apapun yang di laksanakan masyarakat bisa bermanfaat kepada warga setempat.

Disinilah tugas seorang pemberdaya bisa mengukur sejauh mana partisipasi masyarakat di lapangan agar potensi yang ada baik dari lingkungannya maupun potensi ekonomi bisa di gali secara bersama-sama dengan keterlibatan semua pihak baik dari pemerintahnya maupun warga masyarakat sehingga terdorong munculnya sikap partisipasi.²¹

Teori Partisipasi Masyarakat Menurut Para Ahli:

²⁰ Agus Suryono, *Teori dan Isi* ,,,, hal. 55

²¹ Agus Suryono, *Teori dan Isi* ,,,,, hal. 52

- a. Hetifah berpendapat, “Partisipasi sebagai keterlibatan orang secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari pemerintah kepentingan eksternal”. Dan tidak terikat dengan politik maupun lainnya.
- b. Menurut Histiraludin “Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan”. Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap program pengembangan masyarakat, seolah-olah menjadi “model baru” yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek. Dalam pengembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang dipraktekkan, sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan atau proses bersama saling memahami, merencanakan, menganalisis, dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat.
- c. Selanjutnya menurut Slamet menyatakan bahwa, partisipasi Valderama dalam Arsito mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu :
 - 1) Partisipasi politik (political participation)
 - 2) Partisipasi social (sosial participation)
 - 3) Partisipasi warga (citizen participation/citizenship)²²

²² Suci Handayani, *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi* (Cetakan Pertama). Surakarta: Kompip Solo. 2006, hal. 55

Ketiga hal tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Partisipasi politik (*political participation*) lebih berorientasi pada “mempengaruhi” dan “mendudukan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga pemerintah ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses pengambil keputusan itu sendiri oleh pemerintah.
- 2) Partisipasi sosial (*social participation*) partisipasi ditempatkan sebagai beneficiary atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, pemantauan, evaluasi dan implementasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses sosial sebenarnya bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahana pembelajaran dan mobilisasi sosial.
- 3) Partisipasi warga (*citizen participation*) menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalih konsep partisipasi “dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum tersisih menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka. Maka berbeda dengan partisipasi sosial, partisipasi warga memang berorientasi pada agenda

penentuan kebijakan publik. Partisipasi dapat dijelaskan sebagai masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa tidak memiliki dan acuh tak acuh terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Terlebih apabila akan dilakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling memahami keadaan daerahnya tentu akan mampu memberikan masukan yang sangat berharga. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat lokal lah yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Bahkan pula mereka akan mempunyai pengetahuan lokal untuk mengatasi masalah yang dihadapinya tersebut.²³

Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara. Penyusunan perencanaan partisipatif yaitu dalam perumusan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan

²³ Suci Handayani, *Perlibatan Masyarakat* ,,,, hal. 60

masyarakat setempat dilakukan melalui diskusi kelompok-kelompok masyarakat secara terfokus atau secara terarah. Kelompok strategis masyarakat dianggap paling mengetahui potensi, kondisi, masalah, kendala, dan kepentingan (kebutuhan) masyarakat setempat, maka benar-benar berdasar skala prioritas, bersifat dapat diterima oleh masyarakat luas (acceptable) dan dianggap layak dipercaya (reliable) untuk dapat dilaksanakan (implementasi) program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran, berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan terwujud secara optimal pula. Perencanaan program pembangunan disusun sendiri oleh masyarakat, maka selanjutnya implementasinya agar masyarakat juga secara langsung dilibatkan. Perlibatan masyarakat, tenaga kerja lokal, demikian pula kontraktor lokal yang memenuhi syarat. Selanjutnya untuk menjamin hasil pekerjaan terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, peran serta masyarakat dalam pengawasan selayaknya dilibatkan secara nyata, sehingga benar-benar partisipasi masyarakat dilibatkan peran serta mulai penyusunan program, implementasi program sampai kepada pengawasan, dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.²⁴

²⁴ Suci Handayani, *Perlibatan Masyarakat* ,,,, hal. 66

Ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat dalam satu pembangunan program, seperti partisipasi di bidang finansial, partisipasi ketika memberdayakan material, memberdayakan keahlian, dan cara berpikir, partisipasi bidang sosial, partisipasi ketika mau mengambil keputusan, dan partisipasi dalam semua bidang.²⁵

Bisa kita lihat penjelasan di atas, bahwa kata peran di bagi menjadi 2 bagian, satu peran dalam bentuk yang nyata seperti (wujud yang di miliki) yang kedua peran yang di berikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Contoh peran yang nyata adalah harta benda, uang, keahlian dan keterampilan. Contoh peran yang tidak nyata seperti partisipasi, pemberdayaan, buah pikiran, pengambil keputusan dan peran social.

3. Pemberdayaan Masyarakat

a. Defenisi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan atau dalam bahasa inggris disebut dengan empowerment merupakan sebuah konsep yang muncul pada akhir tahun 70-an di daerah Eropa dan terus berkembang hingga saat ini. Ife menyebutkan bahwa pada awal mulanya, konsep pemberdayaan mengacu kepada sebuah upaya pemberian wewenang, tanggungjawab dan kepercayaan kepada setiap individu masyarakat agar dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik (Ife, 2020). Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Ife, Chambers mendefinisikan pemberdayaan sebagai sebuah konsep yang digunakan dalam pembangunan ekonomi yang di dalamnya juga mengandung nilai-

²⁵ Atif Rachmat Ramadhani, dkk., “Strategi Komunikasi Organisasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Kendari (Studi Komunikator Pada Dinas Purp Kota Kendari Bidang Cipta Karya)”, *Ilmu Komunikasi* 53, no. 9, 2019, hal. 99.

nilai sosial. Pendapat ini kemudian berkembang pada pemaknaan yang lebih luas, dimana pemberdayaan bukan hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau mencegah kemiskinan, akan tetapi juga dilakukan untuk merencanakan masa depan yang lebih baik, sehingga stabilitas ekonomi dan sosial dapat berlangsung dengan berkelanjutan.²⁶

Defenisi Pemberdayaan adalah menempatkan manusia sebagai subyek dalam dunianya sendiri. Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya membantu masyarakat untuk mengembangkan kemampuan sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatur masalah dan mengambil keputusan secara mandiri, memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan disinilah peran komunikator bisa memotivasi orang lain untuk bisa berpartisipasi secara sukarela tanpa pamrih.²⁷

Pemberdayaan adalah proses masyarakat untuk bisa mengambil kebijakan maupun keputusan, sehingga masyarakat bisa langsung terlibat baik dalam forum diskusi maupun rapat untuk mengambil keputusan bersama sehingga bisa menghasilkan kata mupakat yang secara bersama-sama di sepakati dan di setuju itulah arti dari pemberdayaan. Sedangkan peran representatif dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandate terkait kepentingan kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi maupun kepanitian.

²⁶ Chambers, D., Thiekötter, A., & Chambers, L. (2013). Preparing student nurses for contemporary practice: The case for discovery learning. *Journal of Nursing Education and Practice*.3

²⁷ <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=defenisi+pemberdayaan>

Hurairah Risky menyebutkan bahwa tujuan dari pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan yang berdasarkan pada potensi atau kekuatan masyarakat itu sendiri. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Hurairah, Fahrudin juga menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan cara melakukan optimalisasi terhadap sumber daya dan potensi masyarakat. Selanjutnya, Sedarmayanti juga memaknai pemberdayaan masyarakat adalah bentuk upaya untuk menciptakan masyarakat yang mandiri.²⁸

Dikatakan demikian, karena pemberdayaan masyarakat dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat disemua aspek pembangunan didalam masyarakat. Hal ini juga searah dengan apa yang dikemukakan oleh Wirutomo, bahwa tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan.

Pemberdayaan masyarakat pada umumnya juga memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperbaiki maupun meningkatkan kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pada program pemberdayaan, masyarakat bukan hanya dilatih untuk meningkatkan kapasitas dirinya, akan tetapi juga dilatih agar dapat memanfaatkan potensi sumber daya yang ada disekitarnya, sehingga dapat bermanfaat ataupun memiliki nilai jual.

b. Aspek dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Pendapat Soemodiningrat dalam tulisannya bahwa pemberdayaan

²⁸ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, PT. Refika Aditama, Bandung. 2012, hal. 25

memiliki 3 indikator, yaitu *enabling*, *empowering* dan *protecting*.

1) *Enabling*

Enabling bermakna menciptakan iklim atau suasana yang mendukung masyarakat untuk mengembangkan potensinya. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa setiap individu memiliki potensi, akan tetapi karena tidak adanya motivasi atau karena adanya keterbatasan dalam diri individu, sehingga potensi yang ada tidak dapat berkembang. Itulah sebabnya dengan adanya diciptakan iklim yang mendukung, maka masyarakat dapat mengembangkan potensinya secara maksimal

2) *Empowering*

Empowering berarti memperkuat daya tarik atau potensi yang ada di masyarakat. Penguatan potensi ini dilakukan melalui tahapan-tahapan yang melibatkan sumber daya (input) serta dengan memanfaatkan berbagai macam peluang yang ada. *Empowering* pada umumnya difokuskan pada beberapa bidang pokok, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan sarana prasarana, teknologi informasi dan komunikasi, serta dalam berbagai bentuk layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat

3) *Protecting*

Protecting bermakna memberikan perlindungan serta melakukan pembelaan alam rangka pemenuhan kepentingan masyarakat minoritas atau lemah. Dalam konteks ini, maka nilai-nilai demokrasi merupakan nilai yang sangat penting untuk dilaksanakan, karena masyarakat

mioritas atau lemah umumnya tidak diberikan kesempatan untuk terlibat.

Oleh sebab itu, adanya *protecting* dapat menjamin bahwa semua masyarakat baik mayoritas maupun minoritas dalam terlibat dan berkontribusi secara aktif di dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, maupun pada tahapan-tahapan lainnya. Hal ini juga mendukung agar tidak terjadi diskriminasi atau kesenjangan sosial²⁹

Pemberdayaan adalah salah satu keberhasilan yang dapat diukur dengan berbagai indikator yang telah ditetapkan. indikator juga dapat menjadi pedoman agar pelaksanaan pemberdayaan menjadi lebih fokus dan tepat sasaran. Menurut Suharto, keberhasilan suatu pemberdayaan sangat erat kaitannya dengan ekonomi, kesejahteraan dan politis. Ketiga aspek ini kemudian dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu kekuasaan atas (power over), kekuasaan didalam (power within), dan kekuasaan depan (power with, kekuasaan.³⁰

Berdasarkan ketiga aspek dan keempat dimensi kekuasaan tersebut, maka terdapat 5 indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat, antara lain yaitu:

- 1) Kebebasan mobilitas: bermakna bahwa seorang individu masyarakat dapat bebas untuk bergerak kemanapun yang ia inginkan tanpa adanya larangan atau pembatasan dari orang lain.
- 2) Bebas dari dominasi: yaitu bebas untuk melakukan apapun yang ia

²⁹ Sumodiningra Gunawan, t. *Kajian Ringkas Tentang Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta: Kompas. 2007, hal. 25

³⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT Refika Aditama. Bandung, 2006., hal. 22

inginkan tanpa adanya dominasi atau paksaan dari orang lain.

- 3) Terlibat dalam pengambilan keputusan: karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum, maka setiap orang juga berhak untuk menyampaikan aspirasinya dan terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan tanpa harus diwakilkan oleh orang lain.
- 4) Sadar hukum dan politik: seorang individu yang sudah berdaya dan memiliki kapasitas yang baik tentu memiliki kesadaran untuk patuh kepada hukum yang berlaku dan tetap mampu untuk bertanggung jawab terhadap sanksi atau hukuman atas pelanggaran hukum yang dilakukan. Adapun secara politik, maka setiap individu juga memiliki kebebasan untuk terlibat didalam kontestasi politik yang ada dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.
- 5) Jaminan ekonomi ada: Setiap individu masyarakat yang telah berhasil memberdayakan dirinya akan mampu untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari kebutuhan dasar yang bersifat ekonomi, maupun kebutuhan lain sesuai dengan kemampuannya. Apabila seorang individu masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan/atau masih bergantung terhadap orang lain, maka hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang telah dilakukan belum dilaksanakan secara optimal atau bahkan gagal.³¹

³¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan* ,,,, hal. 22

c. Bentuk dan Tipe Pemberdayaan Masyarakat

Program kota tanpa kumuh adalah salah satu program pemberdayaan masyarakat yang menggunakan pendekatan bottom up, karena lebih focus kepada masyarakat untuk targetnya di lapangan, dan di lakukan juga atas inisiatif dan curah pendapat dari masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring pelaksanaan pembangunan di lapangan, disini masyarakat punya andil yang sangat besar dalam program.³²

Bentuk pengembangan pemberdayaan kepada masyarakat yang kurang mampu akan menjadi pembelajaran terkait ekonomi, di mana komunikator harus bisa memberdayakan masyarakat lewat pemberdayaan social, ada pembelajaran yang harus di berikan antara lain:

- 1) Penyadaran tentang peningkatan kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan atau permasalahan yang menimbulkan kesulitan hidup dan penderitaan yang dialami oleh masyarakat.
- 2) Penyadaran tentang kelemahan maupun potensi yang dimiliki sehingga menimbulkan dan meningkatkan kepercayaan pada diri sendiri untuk keluar dari persoalan dan guna memecahkan permasalahan serta mengembangkan diri.
- 3) Meningkatkan kemampuan manajemen sumber daya yang telah dimiliki.

Selanjutnya pemberdayaan akan di maknai di masyarakat sebagai pemberdayaan sejati agar masyarakat hendaknya bisa membuat masyarakat

³² Suhartini A. Halim, dkk. *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005, hal. 8.

menjadi tergantung pada program-program pemberian, akan tetapi setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri, dan hasil akhirnya memandirikan masyarakat dan membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara terus menerus.

Oleh sebab itu masyarakat itu sendiri harus bisa mengetahui tentang kebutuhannya dan bagaimana memenuhinya, pemberdayaan masyarakat di bagi jadi tujuh (7) karakter, seperti manipulative / pasif, caranya memberikan informasi yang baik, lewat konsultasi, bidang insentif materil, bidang interaktif, self mobilization dan bidang fungsional.³³

d. Pandangan Islam Tentang Pemberdayaan Masyarakat

Pandangan islam tentang pemberdayaan kepada masyarakat yang madani sebagai suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam agama Islam akan memiliki pendekatan yang holistik dan strategis. Berkaitan dengan itu, Islam telah memiliki paradigma strategis dan holistik dalam memandang suatu pemberdayaan.

Pendapat istiqomah dalam jurnal pengembangan masyarakat islam seorang pemberdaya harus bisa mengembangkan skil untuk masyarakat islam ini menjadi sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatannya di dunia maupun kesejahteraan dan keselamatannya di

³³ Oktarina, dkk., *Komunikasi dalam Perspektif Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hal. 21.

akhirat³⁴

Pendapat Agus Ahmad Syafi'i, seorang pemberdaya atau empowerment dapat diartikan sebagai penganut, secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan.³⁵ Berdasarkan istilah diatas, pengalaman Al-Quran tentang pemberdayaan dhu'afa, "community empowerment" (CE) atau pemberdayaan masyarakat pada intinya adalah menolong klien" (pihak yang diberdayakan), untuk mempunyai daya saing ketika mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan kepada mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimilikinya antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya³⁶

Dalam pengalaman Al-Qur'an, di kutip dari Jim Iffah bahwa pemberdayaan dalam penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk masyarakat harus bisa mengembangkan kapasitas mereka sehingga mereka bisa menemukan masa depan mereka yang lebih bagus.³⁷

Pemberdayaan menurut Gunawan Sumoharjodiningrat adalah "

Salah satu upaya untuk membangun daya yang dimiliki kaum dhu'afa dengan mendorong, memberikan motivasi untuk meningkatkan kesadaran

³⁴ Matthoriq, dkk, Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang), Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 2, No. 3

³⁵ Agus Ahmad Syafi'i, *Menejemen Masyarakat Islam*, Bandung: Gerbang Masyarakat Baru, 2004, hal.70

³⁶ Asep Usman Ismail, *Pengalaman Al-Quran Tentang Pemberdayaan Dhu'afa*(Jakarta: Dakwah Press) Cet Ke-1, hal. 9

³⁷ Asep Usman Ismail, *Pengalaman Al-Quran*,,,, hal. 9

tentang potensi yang dimiliki mereka, serta merubah untuk pencapaiannya.³⁸

Agus Efendi mengatakan sebagaimana dikutip oleh Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei dalam bukunya pengembangan masyarakat islam, di bagi menjadi tiga kelompok pemberdaya antara lain.

1. Pertama, pemberdayaan pada matra ruhaniah. Pemberdayaan ini diperlukan karena degradasi moral masyarakat Islam saat ini sangatlah memprihatinkan. Kepribadian umat Islam terutama generasi mudanya begitu mudah terkooptasi oleh budaya negatif “Barat” yang merupakan antitesa dari nilai-nilai Islam dan tidak dapat memilahnya. Keadan ini masih diperparah oleh gagalnya pendidikan agama di hampir semua pendidikan. Karenanya, umat Islam harus berjuang keras untuk melahirkan disain kurikulum pendidikan yang benar-benar berorientasi pada pemberdayaan total ruhaniah Islamiyah³⁹
2. Pemberdayaan intelektual. Saat ini dapat disaksikan betapa umat Islam yang ada di Indonesia sudah terlalu jauh tertinggal dalam kemajuan dan penguasaan iptek. Keadaan ini juga diperparah dengan orientasi lembaga pendidikan yang ada mulai dari tingkat TK sampai Perguruan Tinggi lebih banyak berorientasi pada bisnis semata, lembaga pendidikan dijadikan arena bisnis yang subur. Untuk itu diperlukan berbagai upaya pemberdayaan intelektual sebagai sebuah perjuangan besar dari pengembalian orientasi pendidikan pada pengembangan intelektualan.

³⁸ Gunawan Sumohadiningrat, *Pembangunan Daerah Dan Membangun Masyarakata*, Jakarta, Bina Rena Pariwisata, 1997, hal. 165

³⁹ Dian Iskandar Jaelani, *Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya Dan Strategi)*, *Eksyar*, Volume 01, Nomor 01, Maret 2014: 018-034

3. Pemberdayaan ekonomi. Harus diakui bahwa kemiskinan dan ketertinggalan menjadi demikian identik dengan mayoritas umat Islam, khususnya di Indonesia. Untuk memecahkannya, tentunya ada dalam masyarakat sendiri, mulai dari sistem ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah, keberpihakan pemerintahan dalam mengambil kebijakan ekonomi dan kemauan serta kemampuan masyarakat sendiri. Karenanya, diperlukan sebuah strategi dan kebijakan untuk keluar dari himpitan ketertinggalan dan ketimpangan ekonomi tersebut.

Dalam pandangan islam kemiskinan tidaklah sebuah kutukan ataupun azab yang di turunkan allah SWT, tapi di karenakan adanya pemahamana manusia yang salah tentang rezeki maupun pendapatan yang turunkan. Al-Qur'an telah menyebutkan pada surat Az-Zukhruf: 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Taraf hidup manusia pasti akan berbeda tapi itu adalah sebuah rahmat sekaligus “peringat” bagi kita manusia yang lebih “berdaya” untuk saling bahu membahu dengan masyarakat yang kurang mampu. Pemahaman seperti inilah yang harus ditanamkan di kalangan umat islam, sikap simpati

dan empati terhadap sesama harus di pupuk sejak awal. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasulnya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota. Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

“Kemiskinan absolut” sebenarnya tidak perlu terjadi apabila umat Islam memahami secara benar dan menyeluruh (kaffah) ayat-ayat Tuhan tadi. Kemiskinan dalam Islam lebih banyak dilihat dari kacamata non-ekonomi seperti kemalasan, lemahnya daya juang, dan minimnya semangat kemandirian. Karena itu, dalam konsepsi pemberdayaan, titik berat pemberdayaan bukan saja pada sektor ekonomi (peningkatan pendapatan, Konsep pemberdayaan yang dicontohkan Rasulullah SAW mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju, yang dititik beratkan pada “Menghapuskan penyebab kemiskinan” bukan pada “Penghapusan kemiskinan” semata seperti halnya dengan memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya sementara. Demikian pula, di dalam mengatasi problematika

tersebut, Rasulullah tidak hanya memberikan nasihat dan anjuran, tetapi beliau juga memberi tuntunan berusaha agar rakyat biasa mampu mengatasi permasalahannya sendiri dengan apa yang dimilikinya, sesuai dengan keahliannya. Rasulullah SAW memberi tuntunan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji

Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa kemiskinan lebih banyak diakibatkan sikap dan perilaku umat yang salah dalam memahami ayat-ayat Allah SWT, khususnya pemahaman terhadap kepemilikan harta kekayaan. Dengan demikian, apa yang kemudian disebut dalam teori sosiologi sebagai

Semua yang ada di bumi ini mengalami perubahan. Islam memandang perubahan merupakan suatu keharusan dan keniscayaan. Tetapi suatu perubahan harus berubah kearah yang lebih baik. Bahwasannya perubahan itu akan terjadi apabila suatu masyarakat itu berkeinginan untuk berubah sendiri. Masyarakat mempunyai usaha untuk merubah nasibnya agar menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Allah berfirman dalam surat al-Isra' ayat 84:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۖ فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

Artinya: Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Islam adalah salah satu agama yang diwajibkan kita saling menghormati dan saling berusaha agar tidak bergantung dengan orang lain.

Tidak akan berubah nasib suatu kaum kecuali dirinya sendiri yang merubah oleh karenanya seorang pemberdaya hanya bisa mendamping bagaimana supaya ekonomi bisa meningkat harus lewat pelatihan dan adanya pinjaman ekonomi bergulir, oleh sebab itu karena pendampingan sudah ada mari kita ikut terlibat agar program kotaku bisa berhasil di kota padangsidempuan.

4. KOTAKU (Kota tanpa Kumuh)

a. Latar Belakang Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Program kota tanpa kumuh adalah salah satu program direktorat cipta karya dalam pengembangan Kawasan permukiman kumuh, untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah sebagai nakhoda dalam percepatan penanganan kumuh perkotaan pada tahun 2016-2023.⁴⁰

Program kota tanpa kumuh masuk di kota padangsidempuan tahun 2006 untuk 11 lokasi kelurahan/ desa, kenapa program kotaku masuk di kota padangsidempuan karena adanya lokasi kumuh yang tidak bisa dituntaskan oleh dana apbd sehingga perlu kolaborasi dalam hal penuntasan kekumuhannya. Makanya pemerintah daerah kota padangsidempuan sangat bersyukur dengan adanya masuk program kotaku ke kelurahan/ desa karena bisa membantu daerah dalam hal pembangunan.

Program kotaku menggunakan sinergi platform kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya, agar pembangunan berbasis masyarakat bisa terwujud. Target dari program kotaku harus

⁴⁰ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Program Kotaku kota Padangsidempuan*, 2021

adanya pemberdayaan kepada masyarakat sehingga tujuan untuk mengatasi permasalahan bisa terlaksana dengan adanya pemberdayaan dari komunikator.

Berkomitmen untuk berusaha merubah permukiman yang tergolong kumuh dapat berubah menjadi permukiman yang layak huni dan terwujudnya “Gerakan 100-0-100”, yang dimaksudkan adalah tersedianya seratus persen akses dan tersedianya air bersih, nol persen permukiman kumuh dan seratus persen tersedianya akses sanitasi yang layak. Kebijakan dan arah pembangunan Dirjen Cipta Karya yaitu pembangunan sistem, fasilitas pemerintah daerah dan fasilitasi komunitas.⁴¹

Program Kotaku menggunakan sinergi *platform* kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya di kabupaten/kota serta Pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat untuk mempercepat penanganan kumuh perkotaan dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan sehingga pemerintah dianggap jadi nakhoda.⁴²

Pemerintah pada program kotaku harus bisa mengayomi dan bersinergi agar permasalahan kumuh yang ada di kota padangsidempuan bisa teratasi dengan adanya kolaborasi antara pusat, daerah dan pihak swasta, tugas kuminikator disini memberikan arahan dan pendampingan agar masyarakat mau terlibat dalam kegiatan kotaku, dan komunikator disini adalah fasilitator pendamping yang ada di lapangan.

⁴¹ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

⁴² Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

b. Pengertian Pemberdayaan

Seorang pemberdaya masyarakat harus punya talenta dalam hal penyampaian informasi karena inilah salah satu wujud bukti keberhasilan. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling berkaitan, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan Lembaga yang siap membantu dalam hal pemberdayaan yaitu bkm.⁴³

BKM satu Lembaga yang punya tujuan yang sama dalam hal membantu masyarakat untuk menuntaskan kekumuhan dan bkm juga adalah salah satu wadah tempat menampungnya aspirasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, makanya orang yang ada di dalam bkm harus berjiwa relawan tanpa unsur paksaan agar program kotaku bisa berjalan di lapangan dengan bkm yang jujur dan adil.

Lembaga BKM juga sebagai komunikator pemberdaya untuk masyarakat karena informasi dan berita-berita akan disampaikan oleh bkm juga baik informasi tentang ekonomi, sosial maupun lingkungan, makanya Lembaga bkm harus kuat di lapangan sehingga apa tujuan dari program kotaku bisa sama-sama terealisasi dengan baik, fasilitator dan kelompok swadaya masyarakat. Adapun tujuan badan kesewadayaan masyarakat yang berdaya dan mampu memecahkan persoalan mereka sendiri.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu adanya pencapaian yang di kerjakan badan kesewadayaan masyarakat agar permukiman kumuh bisa

⁴³ Arwini Ramadhani, "Efektivitas Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kecamatan Tamalate Kota Makassar," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 8, no. 2, tahun 2019, hal. 32.

teratasi secara bersama-sama antara lain:

- 1) Kesadaran masyarakat dan kepedulian masyarakat untuk memperkuat kembali ikatan pemersatu sebagai media untuk membangun solidaritas social lewat pembelajaran yang focus pada kelompok.
- 2) Tujuan masyarakat memahami Pemberdayaan BKM ap aarti nilai dan prinsip yang diusung oleh BKM, Fungsi dan peran BKM, criteria pengurus BKM dan aturan bersama BKM.
- 3) Masyarakat mempunyai klompok yang terlibat pada program KOTAKU pengurangan kumuh dan punya perencanaan yang terstruktur sehingga punya aturan bersama untuk kegiatan BKM.⁴⁴
- 4) Menerapkan dan membangun nilai kemasyarakatan baik kegiatan amal seperti kemanusiaan yang di pelopori BKM yang menjadi sumber Pemberdayaan Masyarakat.⁴⁵
- 5) Aturan bersama berfungsi secara tanggung jawab, keswadayaan modal, dll. Tujuan dari Pemberdayaan adalah agar Masyarakat desa Aek Tuhul kecamatan Padang Sidempuan Batunadua kota Padang Sidempuan bisa berdaya secara mandiri baik secara pinansial maupun pola pikir, sehingga masyarakat bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka sendiri. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah pemberdayaan komunitas lokal memiliki tujuan agar masyarakat menjadi lebih aktif, berinisiatif, dan berdaya dalam membangun dan menyelesaikan masalahnya. Intinya, komunitas adalah aktor dalam pembangunan desa

⁴⁴ Arwini Ramadhani, "*Efektivitas Penanganan*,,, hal. 36.

⁴⁵ Arwini Ramadhani, "*Efektivitas Penanganan*,,, hal. 39.

Aek Tuhul kecamatan Padang Sidempuan Batunadua kota Padang Sidempuan.⁴⁶

c. Pengertian Program Kotaku

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah program perencanaan pembangunan yang diimplementasikan secara nasional menjadi kebutuhan yang mendesak, atau dasar terhadap penanganan kumuh yang menyinergikan beberapa sumber pendanaan dan juga sumber daya, baik dari masyarakat, pihak swasta, pemerintah kota/kabupaten, provinsi, pusat dan juga beberapa pemangku kepentingan yang lainnya.⁴⁷

Program Kota tanpa kumuh mempunyai perencanaan tujuan untuk membentuk dan membangun system yang secara kolaboratif menangani masalah permukiman yang kumuh, dengan melibatkan pemerintah daerah yang berperan sebagai pemimpin dan berkerjasama dengan para pemangku kepentingan baik dalam hal pengimplementasian dan juga perencanaan pembangunan.

Penerapan perencanaan program kota tanpa kumuh bisa menjadi wadah kolaborasi dalam mendukung dan menyelenggarakan penanganan kumuh terhadap permukiman yang kumuh sekitar 38.431 Ha yang dilaksanakan secara berangsur-angsur melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah, pengembangan pelayanan dasar dan infrastruktur pada tingkatan kota ataupun masyarakat, perencanaan, penguatan kelembagaan, dan juga pendampingan teknis untuk mendukung

⁴⁶ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Program Kotaku kota Padangsidempuan*, 2021

⁴⁷ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

terpenuhinya RPJMN 2020-2024, ialah menciptakan kota tanpa kumuh.⁴⁸

Berkenaan dengan Perumahan dan Kawasan permukiman yang termaktub didalam UU No. 1 Tahun 2011 menjelaskan bahwa permukiman yang kumuh ialah wilayah permukiman yang tidak layak untuk dihuni yang disebabkan oleh tingkat kepadatan, ketidak teraturan rumah penduduk, kualitas, infrakstruktur bangunan yang tidak sesuai berdasarkan pada syarat-syarat bangunan yang layak, sementara itu Perumahan Kumuh ialah perumahan-perumahan yang memiliki kualitas fungsi yang tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal.⁴⁹

Dengan dibentuknya program kotakau dimasyarakat maka sudah bisa mereka menjawab permasalahan-permasalahan selama ini seperti kurang percaya diri masyarakat yang ingin memulai usaha baru dengan berbagai alasan jika peran komunikator pembangunan berjalan dengan baik, bukan tidak mungkin kemiskinan Indonesia akan terus berkurang karena satu usaha yang baru berjalan setidaknya mengurangi pengangguran, dan usaha yang kini sudah berkembang diharapkan bisa menyerap banyak lagi tenaga kerja yang lain. Namun dengan adanya itu semua realitanya masih saja ada kemiskinan serta pola hidup mereka yang belum meningkat, masih besar persentasi angka kemiskinan, kurangnya tingkat kesehatan dan buruknya pengelolaan sanitasi lingkungan. Serta program dana bergulir yang diberikan program kotakau kepada masyarakat seharusnya dijadikan modal untuk memulai dan mengembangkan usaha, akan tetapi pada saat ini

⁴⁸ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

⁴⁹ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

realitanya sudah banyak praktek dana bergulir tersebut juga tidak mampu memberikan dampak positif dan meningkatkan ekonomi bagi masyarakat Aek Tuhul kec. Padang Sidempuan Batunadua.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa karakteristik-karakteristik dari permukiman yang kumuh dan perumahan kumuh yang berdasarkan terhadap aspek-aspek fisik sebagaimana berikut ini:⁵⁰

- 1) Kondisi infrastruktur bangunan yang tidak melengkapi syarat, memiliki kepadatan tinggi dan tidak teratur.
- 2) Keadaan fisik sarana dan prasarana tidak sesuai dengan syarat sarana dan prasarana. Khusus untuk bidang batasan sarana prasarana dan keciptaan karya, ialah sebagaimana berikut ini:
 - a) Jalan akses yang ada pada lingkungan tersebut;
 - b) Drainase yang ada didalam lingkungan tersebut;
 - c) Ketersediaan air minum dan air bersih dilingkungan tersebut;
 - d) Pengelolaan terhadap sampah-sampah yang dihasilkan;
 - e) Pengelolaan terhadap air limbah;
 - f) Pengamanan terhadap terjadinya kebakaran dan;
 - g) Ruang terbuka publik.

Karakteristik-karakteristik fisik tersebut dijadikan sebagai dasar terhadap perumusan indikator dan kriteria terhadap gejala-gejala kumuh di dalam proses pengidentifikasian lokasi permukiman dan perumahan yang

⁵⁰ Yoga kristianto, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Program Kotaku kota Padangsidempuan*, 2021, hal.10

kumuh. Sementara itu, karakteristik-karakteristik non fisik yang perlu diidentifikasi diantaranya adalah kepastian berusaha, kepastian bermukim, perilaku masyarakat, dan juga lain sebagainya.⁵¹

d. Tujuan Program Kotaku

Program Kotaku bertujuan untuk memperbaiki akses pembangunan masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas umum yang memadai. Selanjutnya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwilayah perkotaan. Program kotaku pelaksanaannya adalah dengan berbasis masyarakat sehingga dibutuhkan partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat.

Program kotaku mempunyai 3 pendekatan seperti;

- 1) Pendekatan lewat kolaborasi sinergis, maksudnya adalah melakukan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah daerah, swasta dan termasuk penguatan City Changer, pokja dan permukiman kota.
- 2) Pendekatan lewat pembangunan berbasis masyarakat maksudnya adalah pembangunan tersebut melibatkan masyarakat secara langsung dan perubahan perilaku masyarakat menjadi hal yang penting dan revitalisasi peran BKM yang mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam percepatan penanganan kumuh di wilayah.
- 3) Pendekatan lewat Tridaya yaitu kegiatan penanganan kumuh maupun mencegahnya agar kumuh tidak semakin meluas, sinergi penanganan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal dan penanganan sosial.

⁵¹ Zulhan Taufik, Bets Praktis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Program Kotaku kota Padangsidimpuan*, 2022, hal.9

Program kota tanpa kumuh bertujuan untuk pelaksanaan perencanaan agar terwujud dengan semakin sedikitnya permukaan kumuh, banjir tidak ada lagi sehingga bila kita jalan maka jalannya akan bagus. Adapun tujuan pelaksanaannya dapat dijelaskan berikut ini:

- 1) Sudah terbentuknya kelompok kerja perumahan dan Kawasan permukiman (Pokja PKP) di kota padangsidempuan untuk mengatasi permasalahan mengenai perumahan dan permukaan kumuh yang tepat sasaran kepada masyarakat.
- 2) Sudah adanya rancangan pembangunan terkait penanganan kumuh dan penuntasan masalah kumuh perumahan dan permukiman di kota padangsidempuan dan tingkat masyarakat yang tersusun melalui rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD).⁵²
- 3) Berkembangnya pendapata dan penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan adanya bantuan ekonomi bergulir dan infrastruktur peningkatan masyarakat untuk mendukung meningkatnya kualitas dan mutu kawasan permukiman yang kumuh.
- 4) Adanya aturan secara kolektif sebagai bentuk upaya terhadap perubahan hidup sehat bersih di masyarakat. Indikator terwujudnya program dan tujuan pengembangan peningkatan perkotaan tanpa kumuh yaitu berdasarkan pada pengentasan atau penyelesaian permukiman yang kumuh diperkotaan dan diatur pada Rencana Pembangunan Jangka

⁵² Aguspriyanti, Peran Program Kotaku dalam meningkatkan kualitas fisik permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Program Kotaku*, 2020

menengah nasional RPJMN 2025-2019.

Ini adalah indikator yang harus terpenuhi pada program kotaku:

- 1) Pelayanan infrastruktur semakin berkembang maka akses masyarakat terhadap infrastruktur perkotaan pada kawasan yang tidak bersih berdasarkan pada kriteria yang ditentukan, diantaranya adalah air bersih/minum; pengelolaan persampahan, pengamanan kebakaran, drainase, pengelolaan air limbah dan tata ruang publik.⁵³
- 2) Berkurangnya kawasan yang kumuh sehingga tercipta akses pelayanan perkotaan dan infrastruktur yang lebih baik.
- 3) Terbentuknya dan berfungsinya kelembagaan POKJA PKP untuk mendukung terwujudnya program kotaku pada tingkat kota padangsidiempuan
- 4) Masyarakat pengguna bermanfaat sehingga menimbulkan rasa senang dan puas terhadap peningkatan mutu kualitas pelayanan perkotaan dan infrastruktur pada kawasan yang kumuh. Semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan pada masyarakat dengan mendukung kehidupan yang terus menerus terhadap wilayah kumuh.⁵⁴

Program kotaku bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Harapannya masyarakat bisa menjaga fasilitas umum

⁵³ Yoga Kristianto, "Program Kotaku " hal. 32

⁵⁴ Bambang Sutrisno, "Pedoman Teknis Program Kotaku" Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Direktorat Jenderal Cipta Karya hal. 12

pelayanan di permukiman kumuh perkotaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan partisipasi pemerintah daerah.⁵⁵

Membangun permukiman yang layak huni dengan system terpadu adalah salah satu yang ada dalam perencanaan pemerintah. Serta mengedepankan partisipasi masyarakat. Program kotaku diharapkan menjadi “platform kolaborasi” yang mendukung penanganan pemukiman kumuh melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar ditingkat kota dan masyarakat.⁵⁶

Agar bisa meningkatkan akses bagi masyarakat miskin terhadap pelayanan sosial, sarana prasarana hingga pendanaan untuk mengembangkan usaha atau permodalan dalam bidang ekonomi.

Untuk Program kotaku dalam bidang penanganan pemukiman kumuh perlu adanya pembangunan yang berkelanjutan sehingga bisa diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam mengentaskan kualitas masyarakat yang lebih baik antara lain:

- 1) Bisa mengentaskan kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari, maka disinilah perlu perencanaan yang matang.

⁵⁵ Aguspriyanti, “Peran Program Kotaku dalam meningkatkan kualitas fisik permukiman”.....hal. 38

⁵⁶ Andi Sultanry, “ Buku Pedoman Tekhnis Program Kota Tanpa Kumuh” Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Direktorat Jenderal Cipta Karya. hal. 19

a) Pendidikan Sosial

Pendidikan merupakan usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik dibagian rohani atau dibagian jasmani. Ada juga para beberapa orang ahli mengartikan pendidikan itu adalah suatu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Dengan pendidikan kita bisa lebih dewasa karena pendidikan tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi kita, dan juga pendidikan tersebut bisa memberantas buta huruf dan akan memberikan keterampilan, kemampuan mental, dan lain sebagainya. Seperti yang tertera didalam UU No.20 tahun 2003.⁵⁷

Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan Negara.⁵⁸

b) Tingkat Pendapatan

Adapun pengaruh tingkat pendapatan konsumsi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka mereka mempunyai hubungan yang bagus, di kutip pendapat kadariah pendapatan dan kekayaan adalah satu factor penentu utama dan konsumsi. Pendapat

⁵⁷ Bambang Sutrisno, "Pedoman Tekhnis Program Kotaku ".....hal. 43

⁵⁸ Zefi Arlinda, "Petunjuk Pelaksanaan Program KotakuTingkat Kabupaten/Kota" , Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Direktorat Cipta Karya. Hal. 21

muana bahwa pendapatan seseorang merupakan factor utama yang menentukan pola konsumsi. Bidang ekonomi adalah salah satu yang ada pada program kotaku terkait pendapatan .⁵⁹

Bidang ekonomi pada dasarnya adalah satu program kotaku yaitu pinjaman bergulir kepada masyarakat yang punya usaha menengah ke bawah maka BKM akan memberikan bantuan kepada KSM (Kelompok swadaya masyarakat) bila sudah memenuhi syarat proposalnya, minimal satu kelompok 5 orang.

Pinjaman ekonomi bergulir ini bertujuan untuk menambah pendapatan masyarakat berbasis makro, di mana harapannya masyarakat bisa meningkatkan usahanya baik dalam layanan pasar maupun di sekitar rumahnya, sehingga pemberdayaan kepada masyarakat bisa terlaksana lewat bidang ekonomi.⁶⁰

c) Target kesehatan

Dalam upaya meningkatkan kesehatan maka perlu di lakukan sosialisasi pentingnya menjaga kesehatan apakah melalui pola jaga lingkungan seperti jangan buang sampah sembarangan karena akan menimbulkan penyakit, sosialisasi seperti inilah yang di harapkan ada di masyarakat agar target pemerintah untuk bisa sehat bisa tercapai, inilah tugas seorang komunikator menyampaikan informasi kepada masyarakat.

⁵⁹ Zulhan Taufik, Bets Praktis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat....hal. 28

⁶⁰ Zefi Arlinda, “Petunjuk Pelaksanaan Program KotakuTingkat Kabupaten/Kota”. Hal.

Pada dasarnya kesehatan adalah salah satu martabat yang harus di jaga. Dasar yang di gunakan dalam pembangunan kesehatan di Indonesia adalah: peri kemanusiaan, kesehatan sebagai hak asasi, pemberdayaan dan kemandirian masyarakat, pengutamaan upaya kesehatan promotif dan preventif, pelayanan kesehatan perorangan yang sesuai kebutuhan, dan dukungan sumber daya kesehatan.⁶¹

Perkembangan infrsatraktur dan bidang sanitasi supaya lebih baik pembangunan sarana dan prasarananya dalam bentuk berbagai pembangunan infrastruktur dan bidang sanitasi lingkungan yang baik sangatlah suatu hal yang dinanti-nanti masyarakat pedesaan maupun perkotaan, fasilita-fasilitas tersebut ditujukan untuk lebih meningkatkan potensi dan kinerja masyarakat dalam meningkatkan kebutuhan hidup masyarakat itu sendiri.⁶²

Untuk bisa meningkatkan infrastruktur dan bidang sanitasi lingkungan maka di bagi jadi beberapa bagian sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2018 terkait pencegahan dan peningkatan permukiman kualitas perumahan kumuh, ada 4 aspek yaitu:

a) Fasilitas Umum

(1) Jalan Lingkungan

Jalan lingkungan yang baik adalah dambaan setipa orang baik pejalan kaki maupun kendaraan umum, oleh sebab itu mari

⁶¹ Bambang Sutrisno, “Pedoman Tekhnis Program Kotaku “.....hal. 24

⁶² Andi Sultanry, “ Buku Pedoman Tekhnis Program Kota Tanpa Kumuh.....hal. 43

kita jaga lingkungan kita dengan cara merawat sarana dan prasarana yang di bangun agar tetap indah di pandang mata sehingga becek dan banjir jauh dari lingkungan kita.⁶³

(2) Keteraturan Bangunan

Bangunan yang teratur adalah salah satu bukti kualitas permukiman dapat dilihat dari keteraturan letak besar/kecilnya bangunan. Bangunan yang memiliki ukuran relative sama dan letaknya mengikuti pola tertentu, maka bangunan tersebut akan dikelompokkan pada satuan unit pemetaan yang sama. Penyediaan air bersih dan minum. Salah satu target dalam menangani permukiman adalah terpenuhinya air bersih layak minum bagi semua masyarakat. Air sebagai salah satu kebutuhan terpenting, menjadi faktor yang harus diperhatikan dan tak bisa dipisahkan dari kehidupan.

Peraturan pemerintah republik Indonesia No. 16 tahun 2005 tentang pengembangan bidang penyediaan Air minum terdapat beberapa pendapat antara lain:

- (a) Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

⁶³ Andi Sultanry, “ *Buku Pedoman Tekhnis Program Kota Tanpa Kumuh*.....hal. 44

- (b) Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
- (c) Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.⁶⁴
- (d) Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
- (e) Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan system fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peranmasyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.⁶⁵
- (f) Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan atau mengevaluasi system fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.
- (g) Pelanggan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat,

⁶⁴ Andi Sultanry, “ *Buku Pedoman Tekhnis Program Kota Tanpa Kumuh*.....hal. 46

⁶⁵ Oswar Mungkasa “*Pedoman Tekhnis Program Penanganan Kawasan Kumuh perkotaan*” Direktorat Cipta Karya. Hal 16

atau instansi yang mendapatkan layanan air minum dari penyelenggara. Air minum yang dikonsumsi masyarakat agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan perlu ditetapkan kesehatan kualitas air minumnya.⁶⁶

(3) Drainase

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya).⁶⁷

Drainase dapat diartikan juga sebagai suatu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah, serta cara-cara penanggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut. Dari sudut pandang yang lain, drainase adalah salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Prasarana drainase disini berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah permukaan tanah) dan atau bangunan resapan.⁶⁸

Selain itu juga berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek,

⁶⁶ Bambang Sutrisno, "Pedoman Tekhnis Program Kotaku" ...hal. 46

⁶⁷ Dedy suriadi priatna, " Menuju Kota Tanpa Kumuh Permukiman Kumuh, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Departemen Cipta Karya, Jakarta 2017, hal. 24

⁶⁸ Andi Sultanry, " Buku Pedoman Tekhnis Program Kota Tanpa Kumuh.....hal.17

genangan air dan banjir. Kegunaan saluran drainase ini antara lain:

- (a) Mengeringkan genangan air sehingga tidak ada akumulasi air tanah.
- (b) Menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal.
- (c) Mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan yang ada.
- (d) Mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir.⁶⁹

(4) Pengelolaan sampah

Pengelolaan sampah sejak dari ya. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu kehilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.⁷⁰ Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pencegahan kumuh. Jenis sampah berdasarkan sifatnya:

(a) Sampah Organik (*Degradable*)

Pengertian sampah organik adalah sampah yang dapat membusuk dan terurai sehingga bisa diolah menjadi kompos. Misalnya, sisa makanan, daun kering, sayuran, dan lain-lain.⁷¹

⁶⁹ Dedy Suriadi Priyatna, “ Menuju Kota Tanpa Kumuh Permukiman Kumuh, hal. 12

⁷⁰ Oswar Mungkasa “*Pedoman Tekhnis Program Penanganan Kawasan Kumuh,.... hal.*

⁷¹ Oswar Mungkasa “*Pedoman Tekhnis Program Penanganan Kawasan Kumuh,....hal.25*

(b) Sampah Anorganik (*Undegradable*)

Pengertian sampah anorganik adalah sampah yang sulit membusuk dan tidak dapat terurai. Namun, sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang baru dan bermanfaat. Misalnya botol plastik, kertas bekas, karton, kaleng bekas, dan lain-lain.⁷²

2) Memberdayakan Sosial Masyarakat Sehingga Mampu Berkolaborasi Dalam Mengentaskan Pemukiman Kumuh.

a) Kontak sosial

Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial (yang juga dapat dinamakan proses sosial) karena interaksi merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial, bentuk lain proses sosial hanya merupakan bentuk-bentuk khusus dari interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antara orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.⁷³

Apabila dua orang bertemu, maka interaksi sosial dimulai pada saat itu.⁷⁴ Mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara atau bahkan mungkin berkelahi. Interaksi sosial dapat terjadi apabila

⁷² Dedy Suriadi Priyatna, " Menuju Kota Tanpa Kumuh Permukiman Kumuh, ...hal. 32

⁷³ Arief Rahardi, *Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi Masyarakat*, hal. 23

⁷⁴ Bambang Sutrisno, "Pedoman Teknis Program Kotaku" ...hal. 16

antara dua individu atau kelompok terjadi kontak sosial dan komunikasi, Kontak sosial merupakan tahap pertama dari terjadinya hubungan sosial.⁷⁵

Interaksi adalah kunci dari semua kehidupan, oleh karena itu interaksi tidak akan ada jika tidak ada kehidupan bersama. Bertemunya orang perorangan secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Pergaulan hidup seperti itu baru akan tumbuh apabila perorangan atau perkelompok manusia bekerja sama saling berbicara dan seterusnya untuk mencapai suatu tujuan bersama, mengadakan persaingan, pertikaian, dan sebagainya, maka dapat dikatakan bahwa interaksi sosial yang dinamis.⁷⁶

Interaksi sosial di lingkungan masyarakat sangatlah penting untuk itu bersosialisasi sangatlah diperlukan terlebih dengan masyarakat yang ada disekitar kita, melalui interaksi pula kita bisa mengenal orang-orang yang ada disekitar lingkungan tempat tinggal.⁷⁷

b) Pelatihan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelatihan berasal dari kata dasar Latih yang berarti belajar dan membiasakan diri agar mampu (dapat) melakukan sesuatu. Kata pelatihan merupakan kata yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an yang dalam bahasa

⁷⁵ Dedy Suriadi Priyatna, " Menuju Kota Tanpa Kumuh Permukiman Kumuh,.....hal. 22

⁷⁶ Enik Kristiana, *Rencana Penanganan Lingkungan Pemukiman Kumuh Berbasis Kawasan di Kabupaten Rembang*, "Jurnal Arsitektur 01, n0 01, 2018, hal. 11-15

⁷⁷ Bambang Sutrisno, "Pedoman Tekhnis Program Kotaku" ...hal.27

Indonesia berarti proses, cara, perbuatan melatih, kegiatan atau pekerjaan melatih Pelatihan juga merupakan upaya pembelajaran yang diselenggarakan oleh organisasi baik pemerintah, maupun lembaga swadaya masyarakat ataupun perusahaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan mencapai tujuan organisasi.⁷⁸

Pengertian ini didasarkan pada definisi yang dikemukakan oleh sudjana bahwa: pelatihan adalah upaya pembelajaran yang diselenggarakan oleh organisasi (instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan) untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai tujuan organisasi sehingga pelatihan dapat diartikan sebagai kegiatan edukatif untuk membawa keadaan perilaku peserta pelatihan saat ini kepada perilaku yang lebih baik sebagaimana yang diinginkan oleh organisasi.⁷⁹

Pelatihan dasar kotak yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku dilevel ascot dalam mengawal program, berkembang menjadi ajang kreatifitas seni dan hiburan bagi peserta pelatihan serta mampu meningkatkan system produktifitas serta potensi-potensi yang ada menjadi lebih baik dalam menopang kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Menurut Noe, Hollenbeck, Gerhart dan Wright, training *is a planne deffortt of acilitate the learning of job-related know ledge, skills, and behavior by employee*. Hal ini berarti bahwa pelatihan

⁷⁸ Enik Kristiana, *Rencana Penanganan Lingkungan* ,,,, hal. 17

⁷⁹ Enik Kristiana, *Rencana Penanganan Lingkungan* ,,,, hal. 19

merupakan suatu usaha yang terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian dan perilaku oleh para pegawai. Jadi, definisi pelatihan dari beberapa para ahli dapat disimpulkan setiap upaya yang terencana untuk meningkatkan kinerja yang dikerjakan pada pekerjaan yang saat ini dipegang atau yang terkait dengannya.

Hasil dari pelatihan adalah perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, sikap, atau perilaku tertentu. Dalam hal ini, perubahan pengetahuan yang dimaksud adalah peserta pelatihan awalnya yang tidak mengerti suatu hal menjadi mengerti.

c) Partisipasi masyarakat

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "*participation*" yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan member masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.⁸⁰

Menurut Sundariningrum mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan karakter libatannya, yaitu:

⁸⁰ Enik Kristiana, *Rencana Penanganan Lingkungan* ,,,, hal. 25

a) Partisipasi langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.⁸¹

b) Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D. membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi.⁸²

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama.

Bentuk Partisipasi menurut Effendi yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D, terbagi atas:

a) Partisipasi vertikal

Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu

⁸¹ Enik Kristiana, *Rencana Penanganan Lingkungan* ,,,, hal. 26

⁸² Enik Kristiana, *Rencana Penanganan Lingkungan* ,,,, hal. 29

masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.

b) Partisipasi horizontal

Masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Menurut Basrowi yang dikutip Siti Irene Astuti D., partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁸³

(1) Wawancara

Wawancara yaitu alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Sementara menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi wawancara adalah proses tanya jawab antara dua orang ataulebih dengan bertatap muka secara langsung untuk mendengarkan informasi ataupun keterangan.

(2) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Sedangkan Wardi Bachtiar menyatakan dokumentasi merupakan pengumpulan data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan. Serta pemikiran tentang fenomena yang masih

⁸³ Enik Kristiana, *Rencana Penanganan Lingkungan* ,,,, hal. 33.

aktual. Ia menambahkan bahwa studi dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih dokumen yang sesuai dengan tujuan penelitian, menerangkan dan mencatat, menafsirkan serta menghubungkannya dengan fenomena lain.⁸⁴

Menurut Basrowi yang dikutip Siti Irene Astuti D., partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

(1) Partisipasi fisik

Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah.⁸⁵

(2) Partisipasi non fisik

Partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.⁸⁶

Dengan keterlibatan masyarakat kedalam proses pembangunan, maka pemerintah tidak lagi menerapkan system pembangunan yang *Top Down* namun akan menerapkan system *Bottom Up* dimana usulan yang berasal dari masyarakat akan menjadi masukan penting dalam upaya pembangunan daerah. Partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan seseorang secara sukarela tanpa

⁸⁴ Enik Kristiana, *Rencana Penanganan Lingkungan* ,,,, hal. 35.

⁸⁵ Enik Kristiana, *Rencana Penanganan Lingkungan* ,,,, hal. 36

⁸⁶ Enik Kristiana, *Rencana Penanganan Lingkungan* ,,,, hal. 38

dipaksa dengan kata lain partisipasi adalah keterlibatan secara spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan.

(1) Evaluasi

Evaluasi pada umumnya, dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai sesuatu program kegiatan atau proyek. Informasi ini biasanya berguna untuk pengambilan keputusan, seperti penyempurnaan lebih lanjut dari suatu kegiatan, atau penghentian suatu kegiatan proyek pemberdayaan masyarakat, atau penyebarluasan suatu gagasan yang mendasari suatu kegiatan yang sedang diuji cobakan program kotaku dalam merubah pola hidup yang lebih baik.⁸⁷

Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Ada beberapa pengertian tentang program sendiri. Dalam kamus program adalah rencana program adalah kegiatan yang dilakukan dengan seksama. Melakukan evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan.⁸⁸

Menurut Tyler yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan telah terealisasikan.

⁸⁷ Enik Kristiana, *Rencana Penanganan Lingkungan* ,,,, hal. 39

⁸⁸ Enik Kristiana, *Rencana Penanganan Lingkungan* ,,,, hal. 40

Selanjutnya menurut Cronbach dan Stufflebeam yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan, tujuan Evaluasi Program Menurut Endang Mulyatiningsih, evaluasi program dilakukan dengan tujuan untuk:⁸⁹

- (a) Menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi ini penting untuk mengembangkan program yang sama ditempat lain.
- (b) Mengambil keputusan tentang keberlanjutan sebuah program, apakah program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan. Dilihat dari tujuannya, yaitu ingin mengetahui kondisi sesuatu, maka evaluasi program dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk penelitian evaluatif.⁹⁰

e. Dasar Hukum Program KOTAKU

Dasar hukum program kotakku berdasar pada landasan konstitusional UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan program kotakku yang akan disusun berdasarkan hukum, kemudian. Dasar Hukum program kotakku diantaranya adalah sebagai berikut:⁹¹

- 1) UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1: “Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera

⁸⁹ Enik Kristiana, *Rencana Penanganan Lingkungan* ,,,, hal. 42

⁹⁰ Enik Kristiana, *Rencana Penanganan Lingkungan* ,,,, hal. 43.

⁹¹ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, “Jalan-jalan Ke Kotaku Ke Kelurahan Balik Alam”, Accessed June 2021, hal. 5.

lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. UU Nomor 1 Tahun 2011: Penanganan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau setiap orang.⁹²

- 2) UU Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- 3) UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 4) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 5) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda
- 6) UU Nomor 26 Tahun 2008 tentang RT/RW
- 7) PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 8) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- 9) RPJMN 2015-2019 tentang Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%
- 10) Permen PUPR Nomor 15 Tahun 2015 tentang Strategi Pelaksanaan Kebijakan, Implementasi Percepatan Penanganan Kumuh 2016-2019.⁹³

f. Prinsip Program KOTAKU

Prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan Program KOTAKU diantaranya adalah:

- 1) Pemerintah daerah sebagai Nakhoda Pemerintah daerah dan pemerintah

⁹² Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, “Jalan-jalan,, hal. 6.

⁹³ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, “Jalan-jalan,, hal. 7.

Kelurahan/Desa memimpin kegiatan penanganan permukiman kumuh secara kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan baik sektor maupun actor ditingkatan pemerintahan serta melibatkan masyarakat dan kelompok peduli lainnya.

- 2) Perencanaan komprehensif dan berorientasi *outcome* (pencapaian tujuan program). Penataan permukiman diselenggarakan dengan pola pikir yang komprehensif dan berorientasi pencapaian tujuan terciptanya permukiman layak huni sesuai visi Kabupaten/Kota yang berkontribusi pada pencapaian target nasional yaitu mencapai 0 persen ha permukiman kumuh pada 5 tahun mendatang.
- 3) perencanaan dan penganggaran rencana penanganan permukiman kumuh merupakan produk Pemerintah Daerah sehingga mengacupada visi Kabupaten/Kota dalam RPJMD.
- 4) Partisipatif Pembangunan partisipatif dengan memadukan perencanaan dari atas (*top-down*) dan dari bawah (*bottom-up*) sehingga perencanaan di tingkat masyarakat akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan yang lebih makro/tingkat Kota Kreatif dan Inovatif. Prinsip kreatif dalam penanganan permukiman kumuh adalah upaya untuk selalu mengembangkan ide-ide dan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang yang sangat dibutuhkan dalam penanganan permukiman kumuh untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan menciptakan lingkungan permukiman yang layak huni. Pengelolaan Lingkungan dan Sosial yang menjamin keberlanjutan program investasi KOTAKU harus memuat

prinsip pembangunan yang berkelanjutan, sehingga dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya perlu diterapkan prinsip dan prosedur tertentu yang mengacu pada Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Program KOTAKU.

- 5) Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*). Prinsip ini menjadikan kegiatan penanganan permukiman kumuh sebagai pemicu dan pemacu untuk membangun kapasitas pemerintah daerah pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat, agar mampu melaksanakan dan mengelola pembangunan wilayahnya secara mandiri, dengan menerapkan tata kelola yang baik (*goodgovernance*).
- 6) Investasi penanganan permukiman kumuh disamping harus mendukung perkembangan kota juga harus mampu meningkatkan kapasitas dan daya dukung lingkungan.
- 7) Revitalisasi peran BKM, penajaman peran BKM dari orientasi penanggulangan kemiskinan kepada orientasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.⁹⁴

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang merupakan berkaitan dengan penelitian yang ada dalam aspek tertentu. Penelitian ini memiliki persamaan dan keselarasan sehingga adanya perbedaan dengan penelitian tersebut. Adapun diantara perbedaan dan persamaan tersebut dapat di lihat pada table 1.1 berikut:

⁹⁴ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, "*Jalan-jalan*,, hal. 8.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ tahun Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Ja'far Shodiq/ 2019 Jenis: tesis Lembaga : ilmu administrasi universitas Brawijaya	Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Perspektif Fungsi Administrasi (Studi pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Depok dan Di Kelurahan Depok, Kota Depok).	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa, pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh belum baik, ini didasari dengan dilakukannya fungsi administrasi yang diajukan namun juga masih banyak yang perlu dikoreksi untuk mendapatkan hasil yang optimal. Akan tetapi, dengan adanya program ini dapat dikatakan berhasil, karena terbentuknya dukungan pemerintah daerah akan perbaikan wilayah di kelurahan Depok. Perbedaannya dengan tesis saya bahwa saya fokus membahas tentang peran komunikator dalam pemberdayaan masyarakat sementara peneliti sebelumnya fokus pada fungsi administrasi sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti program kotaku
2.	Irma/ 2019 Jenis: tesis Lembaga: universitas Muhammadiyah Makassar	Evaluasi Tata Kelola Program Kota Tanpa Kumuh "KOTAKU" di Kota Makassar (Studi Kasus Kelurahan Parang Tambung)	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa program Tanpa Kumuh Kelurahan Parang Tambung sudah berjalan sesuai dengan tujuan KOTAKU. Dimana program ini meliputi bidang Sosial dan Ekonomi. Pembangunan lingkungan dan fasilitas untuk memperbaiki jalan, persampahan dan penerangan jalan. Perbedaannya dengan tesis saya bahwa saya fokus membahas tentang peran komunikator dalam pemberdayaan ekonominya sementara peneliti sebelumnya fokus pada tata kelola program kotaku sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang apa itu program kotaku

3.	Putri Ramadhani/ 2021 Jenis: tesis Lembaga: universitas Muhammadiyah Mataram	Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Bima (Studi Kasus Kecamatan Raba)	Hasil penelitian ini bahwa capaian luas kawasan kumuh Skala Kawasan Kota Baru yang terdapat di Kecamatan Raba terdiri dari empat kelurahan. Namun dari keempat kelurahan itu total pencapaian pengurangan kumuh skala kawasan kota baru mencapai 6,15 Ha dan sisa luas kawasan kumuh mencapai 13,10 Ha. Maka program KOTAKU dinyatakan berhasil. Perbedaannya dengan tesis saya bahwa saya focus membahas tentang peran komunikator dalam pemberdayaan ekonominya sementara peneliti sebelumnya fokus pada Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Kemiskinan dalam program kotaku
----	---	---	---



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yaitu satu cara untuk menentukan atau memperoleh data yang diperlukan. Oleh karena itu, untuk memperoleh data atau informasi diperlukan metodologi penelitian antara lain:

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari perencanaan penyusunan proposal hingga penyusunan akhir tesis adalah

Tabel 3.1
Waktu Dan Lokasi Penelitian

No	Nama Lokasi Penelitian	Waktu Penelitian	Target Selesai Penelitian
1.	Desa Aek Tuhul	12 September 2022	18 Juli 2023

Alasan peneliti untuk memilih lokasi desa Aek Tuhul Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan sebagai pertimbangan sebagai berikut.⁹⁵

1. Desa Aek Tuhul salah satu desa dari 79 yang dapat bantuan dari pusat untuk pembangunan rumah produksi dalam hal pengolahan ubi yang ada program kotaku
2. Desa Aek Tuhul salah satu masyarakatnya aktif dan berjiwa relawan tanpa pamrih
3. Desa Aek Tuhul salah satu desa dari 79 yang ada di Kota Padangsidempuan yang lancar ekonomi bergulirnya dan sampai sekarang masih melakukan perguliran di lapangan.

⁹⁵ Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat, direktoral cipta karya *Dokumen Rencana Penataan lingkungan Pemukiman (RPLP)-Aek Tuhul*, hal. 82.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat di amati.⁹⁶ Dengan adanya pendekatan deskriptif untuk bisa melihat peran Komunikator pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat Program (KOTAKU) di Desa Aek Tuhul Kecamatan Padangsidempuan Batunadua. Penelitian kualitatif juga dikatakan sebagai penelitian yang bertujuan untuk memaknai atau menafsirkan suatu realitas atau fenomena berdasarkan data yang tersedia dan diperoleh oleh peneliti melalui dokumentasi/kepuustakaan, observasi dan wawancara serta diuraikan dengan menggunakan model analisis kualitatif secara eksploratif, deskriptif, dan historis.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya.⁹⁷ Untuk memperoleh data dan informasi didalam sebuah penelitian maka dibutuhkan adanya subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah Anggota BKM (Badan Ksewadayaan Masyarakat) yang sudah terbentuk sebagai anggota BKM di Desa Aek Tuhul. Subjek yang baik adalah subjek yang terlibat aktif, cukup mengetahui, memahami atau berkepentingan dengan aktivitas yang akan diteliti, serta memiliki waktu untuk

⁹⁶ Nana sudjana, tuntunan penyusunan karya ilmiah, bandung: sinar baru algensindo 2003 hal. 52

⁹⁷ Lexy J. Moleon, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016), hlm. 3.

memberikan informasi secara benar.⁹⁸ Objek penelitian ini adalah hal yang akan di teliti. seperti apa peran komunikator pembangunan Sedangkan objek suatu penelitian adalah komunikator dilapangan. Bapak Sukur Dalimunte, Amran, Siti Adina, Zulhan Taufik

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁹⁹ Menurut *Burhan Bungin* dalam bukunya "*Penelitian Kualitatif*", disebutkan bahwa informan penelitian atau sumber data adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Data merupakan salah satu unsur atau komponen utama dalam melakukan riset (penelitian), tanpa ada data tidak akan ada riset, dan data dipergunakan dalam suatu riset merupakan data yang harus benar, kalau diperoleh tidak benar maka akan menghasikan informasi yang salah. Menurut *J. Supranto* dalam buku *Rosady Ruslan*, pada dasarnya data sebagai alat pengambilan keputusan atau pemecah permasalahan itu harus tepat dan benar.¹⁰⁰

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada dua macam sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah proses pengambilan data yang didapat langsung oleh peneliti, artinya sumber data yang langsung memberikan data kepada

⁹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010), hlm. 22.

⁹⁹ Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif* (Jakarta: kencana. 2008) hal. 76

¹⁰⁰ Rosady Ruslan. *Public Relation dan komunikasi*, (Jakarta: PT.Raja grafindo persada, 2009) hal. 26-27.

peneliti. Sumber data primer yaitu sumber pokok yang dibutuhkan dalam meneliti. Dalam hal ini yang menjadi data primer dari penelitian ini adalah Bapak Sukur Dalimunte, Amran, Siti Adina, Zulhan Taufik dan anggota BKM yang peneliti ambil hanya 6 orang perwakilan dari anggot BKM.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti dalam hal ini bisa dilihat dalam salah satu buku program kotaku, internet, artikel, jurnal dan sumber lainnya.¹⁰¹ Yang bisa di jadikan sebagai referensi. Data sekunder adalah data yang sudah ada pada lokasi penelitian yaitu sumber data pendukung atau pelengkap. Dalam hal ini yang menjadi data sekunder dari penelitian ini adalah buku program KOTAKU, daftar nama-nama Anggota BKM, dan vidio yang diunggah di internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian prosedur pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Dimana pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek dan subjek yang diteliti.

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pengamatan terhadap satu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Observasi merupakan kegiatan pemusatan

¹⁰¹ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 42.

perhatian semua objek dengan menggunakan seluruh indra.¹⁰² Observasi ini dilakukan selama penelitian, metode ini peneliti gunakan untuk mengamati secara langsung terhadap objek penelitian mengenai peran komunikator pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat program kotaku di Desa Aek Tuhul yang dilakukan oleh komunikator (Fasilitator lapangan) kepada BKM. Observasi adalah sebuah kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan penelitian harus turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, kegiatan, tempat, tujuan dan perasaan.¹⁰³ Observasi peneliti dilakukan dengan observasi partisipan, dimana peneliti terlibat langsung dalam situasi dan gejala yang diamati dalam penelitian berlangsung.¹⁰⁴

2. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara tertulis.¹⁰⁵ Wawancara juga dapat dikatakan sebagai dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁰⁶ Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui cara lisan atau tatap muka antara peneliti dengan sumber data manusia.¹⁰⁷ Sebelum wawancara dilakukan pertanyaan telah disiapkan lebih dahulu sesuai dengan pengalihan data yang

¹⁰² Djaman satarario dan Aan Komaria, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 12.

¹⁰³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 146.

¹⁰⁴ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset*, hal. 165.

¹⁰⁵ Juliansyah Nor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2012), hlm. 140.

¹⁰⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 198.

¹⁰⁷ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Bandung: Rosyada Karya, 2009), hlm. 139.

diperlukan dan kepada siapa wawancara tersebut dilakukan. Teknik wawancara mendalam digunakan untuk mengetahui secara mendalam tentang berbagai informasi yang terkait dengan persoalan yang sedang diteliti kepada pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi secara utuh tentang persoalan yang akan dikaji.

Sedangkan jadwal untuk mengadakan *indepth interview* tidak dibuat sebab akan disesuaikan dengan kesempatan yang ada dan data yang diperlukan. Untuk mengatasi terjadinya informasi yang diragukan, maka setiap hasil wawancara akan diuji dengan membandingkan bentuk informasi yang diterima satu dan informan dengan informasi yang di dapat dari informasi lain.

Dalam metode wawancara ada tiga bentuk yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.¹⁰⁸

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, tujuan agar peneliti lebih leluasa untuk memberikan pertanyaan dan untuk mendapatkan data yang lebih maksimal tentang Peran Komunikator Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat Program Kotaku Desa Aek Tuhul Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan. Untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sukur Dalimunte, Amran, Siti Adina, Zulhan Taufik sebagai komunikator di lapangan dan anggota BKM yang ada di Desa Aek Tuhul Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan..

¹⁰⁸ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 121.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi penelitian baik berupa tulisan, gambar, video, atau rekaman yang memberikan informasi untuk proses penelitian.¹⁰⁹ Dokumentasi juga diartikan sebagai metode pengumpulan data melalui data-data dokumen, berupa catatan, buku-buku, majalah, agenda ataupun jurnal yang dapat memberikan informasi tentang objek yang diteliti..

Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah foto kegiatan pelaksanaan rapat sosialisasi BKM, data-data anggota BKM, dan buku Program Kotaku.¹¹⁰

Ketiga tehknik penelitian data di atas digunakan secara simultan dalam penelitian ini, dalam arti digunakan untuk saling melengkapi antara data satu dengan data yang lain. Sehingga data yang peneliti peroleh memiliki validitas dan keabsahan yang baik untuk dijadikan sebagai sumber informasi.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak pengumpulan data secara keseluruhan. Data kemudian dicek kembali, secara berulang dan mencocokkan data yang diperoleh, data disistematiskan dan diinterpretasikan secara logis sehingga diperoleh data yang absah dan kredibel. Data yang terkumpul dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan,

¹⁰⁹ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Cia Media, 2006), hlm. 152.

¹¹⁰ Hadari nawawi, *metode penelitian bidang social*. Yokyakarta: gajah mada university perss. 1998. Hal 133.

realita, dan fakta yang ada. Data-data yang telah terkumpul tersebut diseleksi dan disajikan kemudian ditafsirkan secara sistematis agar dapat menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan baru yang disebut sebagai hasil temuan.

Analisis data dapat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan data, langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pengolahan data secara kualitatif adalah:

penyederhanaan serta transformasi data kasar yang diperoleh berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi dari proses yang terjadi dilapangan.¹¹¹ Data yang dihasilkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang didapatkan oleh penulis pada saat melakukan penelitian kemudian dipilih kembali, atau dipusatkan pada pembahasan dan kemudian disederhanakan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.¹¹² Penyajian data dalam penelitian ini berupa teksdeskriptif, data yang telah disederhanakan disajikan kembali dengan menceritakan kembali apa yang telah ditemukan dilapangan berdasarkan hasil penelitian.

3. Upaya Penarikan Kesimpulan, setelah data tersebut selesai disajikan maka tahapan terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menarik kesimpulan

¹¹¹ Djaman satarario & aan komaria. *Metode penelitian kualitatif* (bandung: alfabeta 2012), hal. 12

¹¹² Conny R. Semiawan, *Catatan Kecamatanil Penelitian dan Pengembangan ilmu pengetahuan* (Jakarta : Prenada Media Group. 2008) hal 28.

berdasarkan data yang telah disajikan.¹¹³

G. Teknik Keabsahan Data

Untuk menentukan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan tehnik pemeriksaan, pelaksanaan tehnik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

Dalam penelitian ini peneliti menguji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang digunakan dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dijelaskan oleh mahasiswa dengan yang dijelaskan oleh tenaga kependidikan melalui hasil wawancara.
3. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta di lapangan.

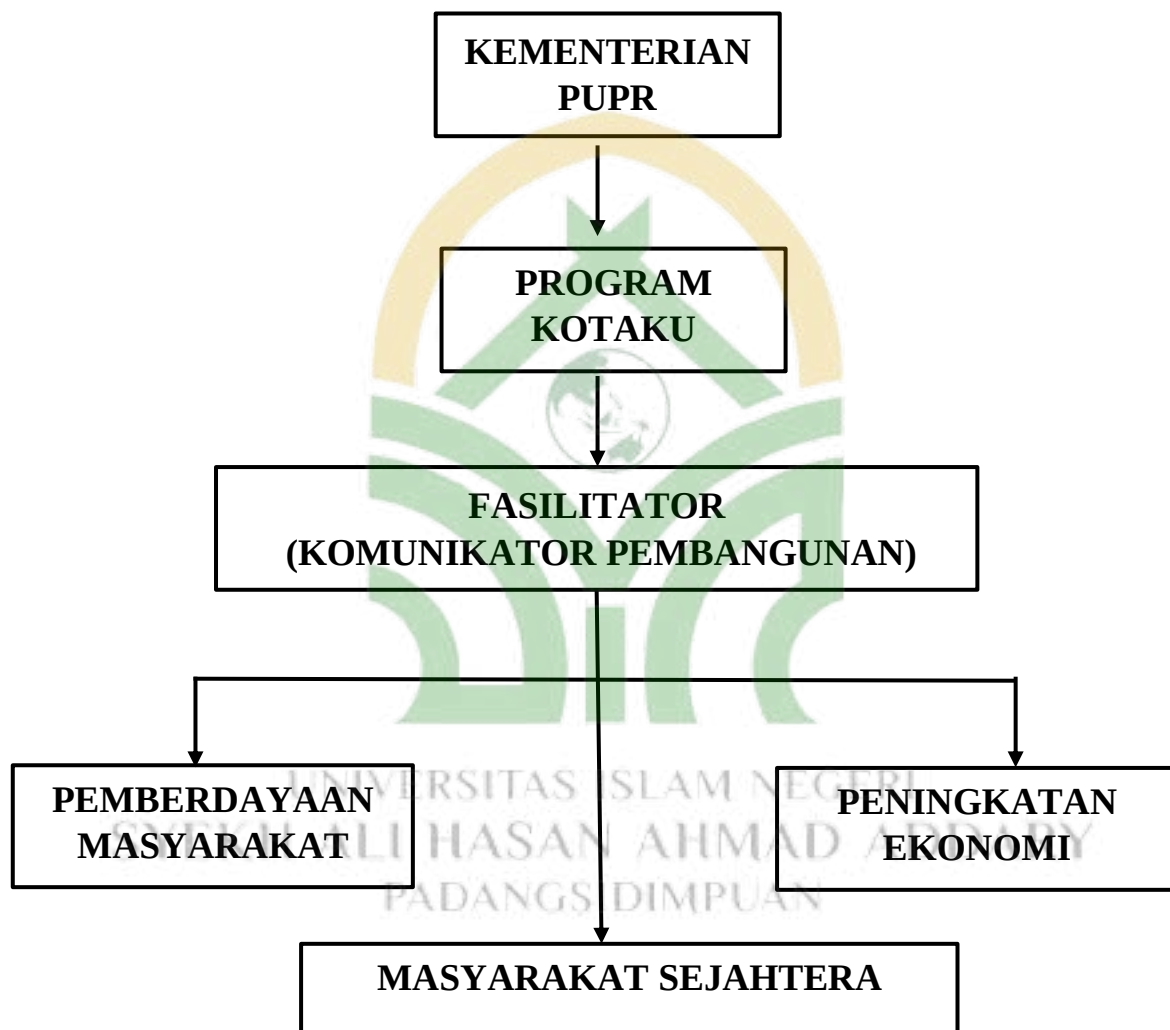
Data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan dibandingkan kembali dengan data yang dapat melalui hasil wawancara agar peneliti mengetahui validitas data yang didapatkan, kemudian hasil wawancara dari mahasiswa dibandingkan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada dosen, setelah hasilnya diketahui yang harus dilakukan peneliti adalah membandingkan hasil yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dengan fakta atau nyata yang

¹¹³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang,,*, hal. 190.

terjadi di lapangan, untuk mengetahui apakah hasil penelitian sudah sesuai secara fakta/nyata serta meningkatkan derajat keabsahan data penulis.¹¹⁴

H. Kerangka Penelitian

Gambar 3.1
Kerangka Penelitian



¹¹⁴Djaman Satarario & Aan Komaria, *metode penelitian kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012) hal.12.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Aek Tuhul Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan

1. Profil Desa Aek Tuhul

Secara geografis Desa Aek Tuhul terletak diantara $1^{\circ}21'57.54''N$ dan $99^{\circ}17'54.7''E$ dan berada pada ketinggian 265 – 462 meter diatas permukaan laut dan luas wilayah 12,02 Ha yang terdiri dari 2 Dusun.¹¹⁵

Secara administratif batas wilayah Desa Aek Tuhul Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Siloting
- b. Sebelah Selatan : Desa Pudun Jae
- c. Sebelah Timur : Desa Pudun Julu
- d. Sebelah Barat : Desa Aek Bayur

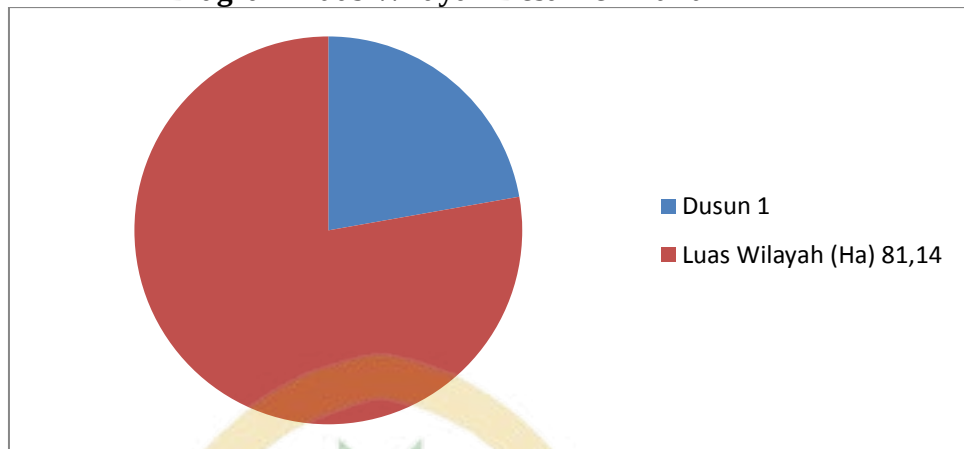
Luas Wilayah berdasarkan Dusun dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Luas Wilayah Desa Aek Tuhul

No	Dusun	Luas Wilayah (Ha)
1	Dusun 1	81,14
2	Dusun 2	7
Total		88,14

¹¹⁵Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) – Aek Tuhul

Gambar 4.1
Diagram Luas Wilayah Desa Aek Tuhul



2. Visi dan Misi Desa Aek Tuhul

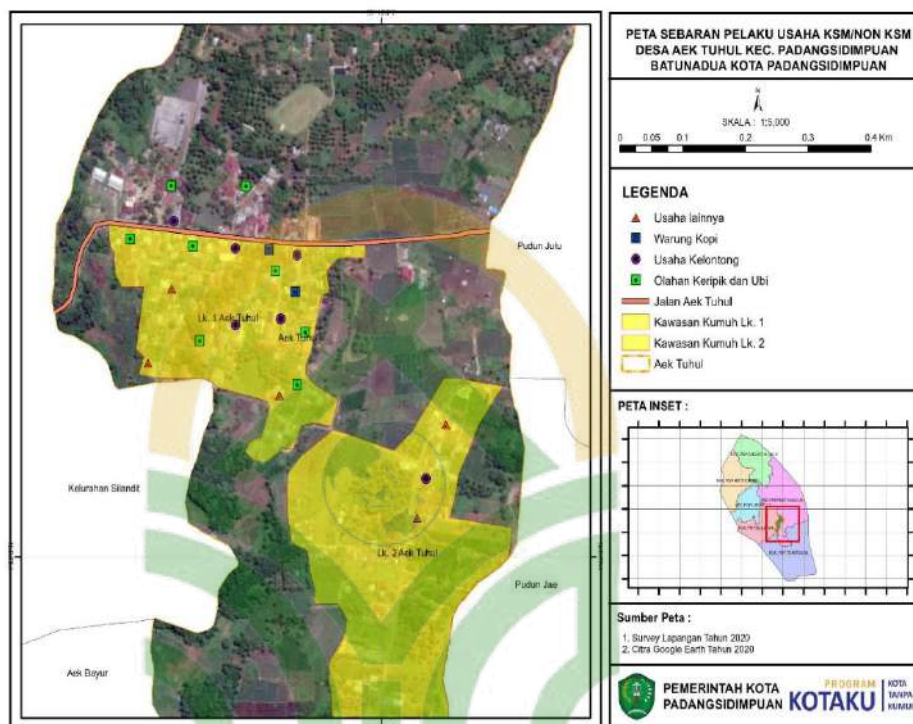
a. Visi Desa Aek Tuhul : “Masyarakat Desa Aek Tuhul mampu membangun sinergi (kerjasama saling “Terwujudnya menguntungkan) dengan berbagai pihak untuk pengembangan pemukiman dalam penanggulangan kemiskinan”

b. Misi Desa Aek Tuhul :

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang bermanfaat, bersih, sehat dan aman.
- 2) Meningkatkan kemampuan sumber daya masyarakat melalui pendidikan keterampilan masyarakat.
- 3) Meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat yang dapat mandiri untuk mampu keluar dari kemiskinan.
- 4) Meningkatkan rasa kekeluargaan, gotong royong dan kepedulian sosial sesama warga masyarakat.
- 5) Mengusahakan akses modal bagi masyarakat miskin.

- 6) Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
- 7) Melakukan penguatan kelembagaan di Pemerintahan Desa

Gambar 4.2
Peta Administrasi Desa Aek Tuhul

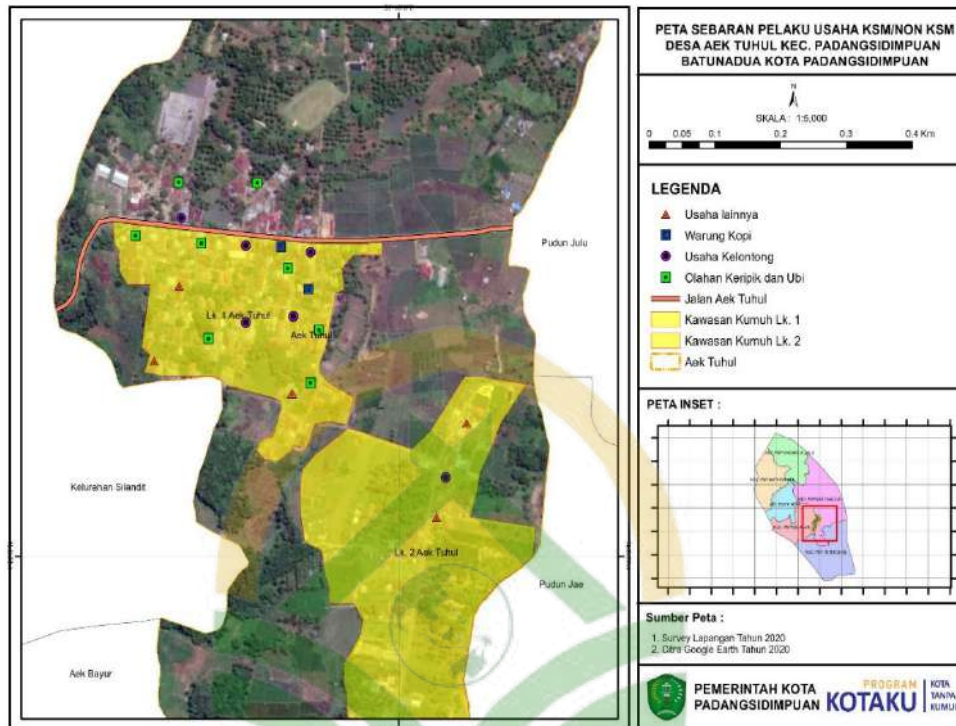


3. Batas Deliniasi Kawasan Kumuh.

Desa Aek Tuhul terdiri dari 2 Dusun. Dimana terdapat 1 dusun yang ditetapkan sebagai kawasan kumuh dengan luasan 18 Ha yaitu berdasarkan (SK Walikota No. 67/KPTS/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Padangsidimpuan Tahun 2021 tanggal 10 Februari 2021 dengan total Luasan Kumuh : 342,17 Ha) sesuai dengan pendataan /review baseline tahun 2020.

Lokasi Permukiman dan Perumahan Kumuh di desa Aek Tuhul dapat dilihat pada peta di bawah ini.

Gambar 4.3
Peta 1.2 Peta Lokasi Kumuh Desa Aek Tuhul



4. Kondisi Penggunaan Lahan Existing

Dalam Penentuan kondisi penggunaan lahan Existing digunakan parameter yaitu :

a. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Desa Aek Tuhul dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya perumahan/ permukiman, perkebunan rakyat, tanah sawah. Sebagian kecil penggunaan lahan berupa perumahan/permukiman yang mencapai 5.98 Ha dan penggunaan lahan untuk luas terbesar yaitu persawahan.

Tabel 4.2
Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
Tanah Sawah	60
Ladang	0
Perkebunan Rakyat	20
Perumahan/Permukiman*	40
Jumlah	120

(*sesuai data baseline Kecamatan Padangsidempuan Dalam Angka 2020)

b. Status Legalitas Lahan

Status legalitas lahan masih menggunakan surat jual beli atau Akta Notaris/ Kantor Camat. Dan/ atau sebagian lahan masyarakat mempunyai Sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN Kota Padangsidempuan.

5. Kondisi Sosial Ekonomi

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sila kelima pancasila menyatakan bahwa keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Suku yang lebih dominan di Desa Aek Tuhul adalah suku Batak Mandailing dan suku Jawa. Pelayanan kesehatan yang terdapat di Desa Aek Tuhul adalah Posyandu. Mencakup bidang pendidikan, di Desa Aek Tuhul, sudah terdapat TK dan SD.

6. Data Kependudukan Dan Sebaran Penduduk

a. Kepadatan penduduk

Kepadatan penduduk Desa pada Tahun 2021 rata-rata yaitu 9,4 jiwa/Ha. Kepadatan penduduk paling tinggi adalah di Dusun I, Dusun

I dengan kepadatan 9,6 jiwa/ Ha. Sedangkan kepadatan penduduk di dusun II, dengan 60 jiwa/Ha. Adapun data kepadatan penduduk selengkapnya dapat dilihat pada

Tabel 4.3.
Sebaran Penduduk

Desa	Luas Wilayah (Ha)	Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Ha²)
Dusun 1	81,14	787	9.6
Dusun 2	7	423	60.4
Total	88,14	1210	70

b. Struktur Penduduk

Mengenai kependudukan digunakan sebagai dasar untuk perencanaan pada berbagai bidang pembangunan dan untuk melakukan evaluasi dari hasil pembangunan. Jumlah penduduk Desa Aek Tuhul pada tahun 2021 sebanyak 1210 jiwa, yang terdiri dari 593 laki – laki (49%) dan 617 perempuan (51%).

Tabel 4.4
Struktur Penduduk Laki laki dan Perempuan

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2022	602	626	1228
2023	611	635	1246
2024	620	645	1265
2025	629	654	1283

Dengan melihat perbandingan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan.

c. Tabel dan peta sebaran Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Tabel Sebaran MBR dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 4.5
Sebaran MBR

No	Alamat RT/RW	Jumlah KK	Jumlah MBR
1	Dusun 1	183	163
2	Dusun 2	97	70
Total		288	233

d. Tabel mata pencaharian masyarakat

Tabel mata pencaharian masyarakat tertuang dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.6
Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Tahun 2020

No	Lokasi (LK)	Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan (orang)				
		Petanian, perkebunan, kehutanan, peternakan	Konstruksi bangunan	Industri /Pabrik	Perdagangan/ jasa	PNS/TNI/Polri
1.	Dusun 1	87	2	8	39	18
2.	Dusun 2	40	15	0	20	17
	Jumlah	127	17	8	59	35

7. Peta existing Infrastruktur, sarana dan prasarana sosial dan ekonomi

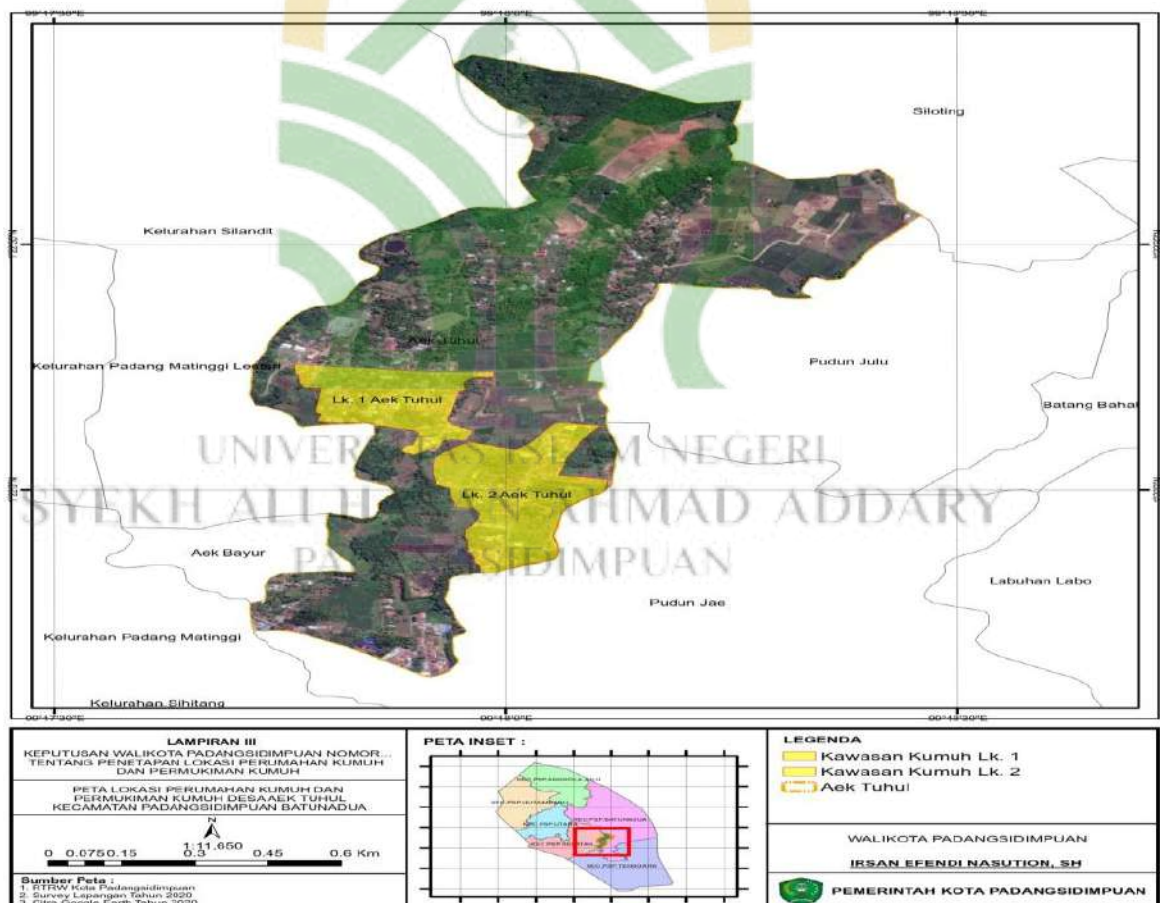
a. Jaringan Jalan

Panjang jalan secara keseluruhan di Desa Aek Tuhul Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua adalah sepanjang 4003 M yang meliputi panjang jalan lebar 1.5 M sepanjang 3600 M dan panjang jalan dengan lebar dari 1.5 M yang diperkeras sepanjang 2543 M dengan jangkauan jaringan jalan yang diperkeras dan tidak rusak sepanjang 750 M.

Tabel 4.7
Jaringan Jalan

dusun	Panjang total Jaringan Jalan Lingkungan yg ada	Panjang jalan lingkungan dgn lebar > 1,5 meter	Panjang total Jaringan Jalan Lingkungan yang Ideal	Panjang jalan lingkungan dgn lebar $\geq 1,5$ meter yang permukaannya diperkeras dan tidak rusak	Total Panjang keseluruhan jalan lingkungan yang permukaannya tidak rusak
1	3483	3483	3483	650	650
2	520	117	520	100	100
Total	4003	3600	4003	760	750

Gambar 4.4
Peta Jaringan Jalan Desa Aek Tuhul



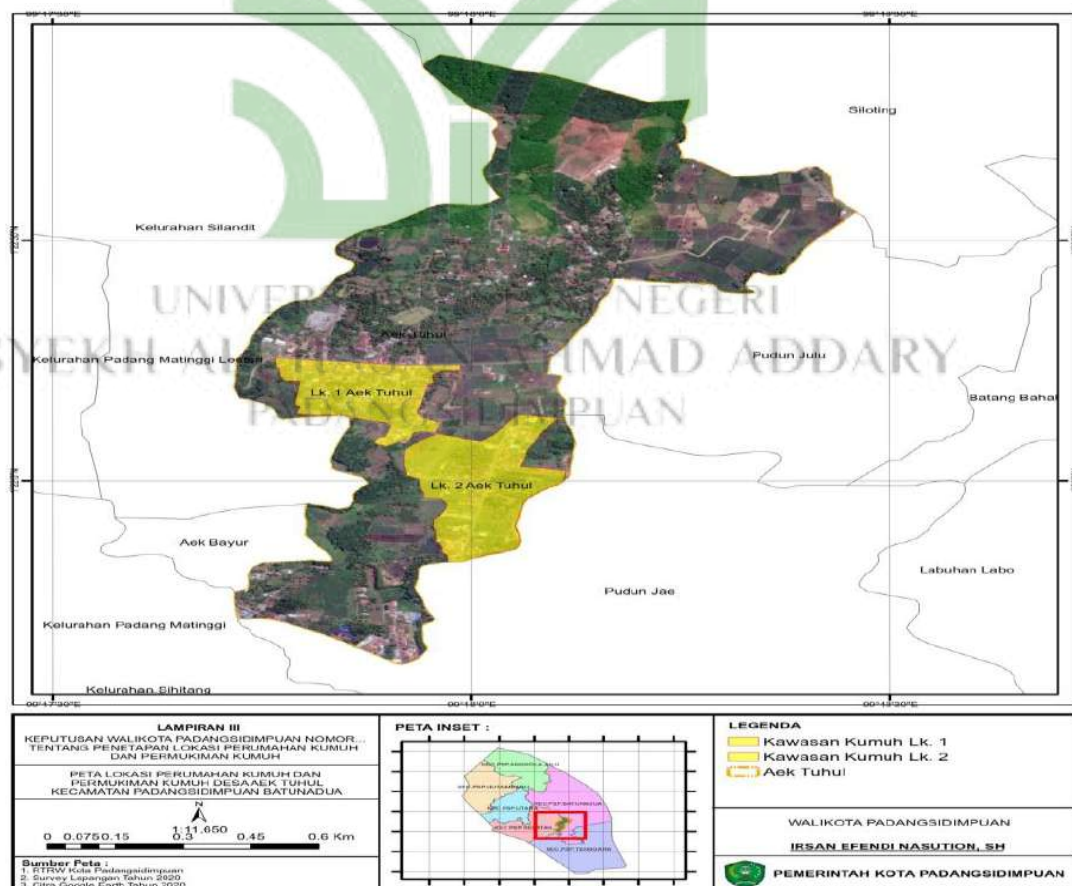
b. Jaringan Saluran Pembuangan Air Limbah

Jumlah Kepala Keluarga di Desa Aek Tuhul yang meliputi 2 Dusun sebanyak 280 KK. Dari total Kepala Keluarga masih terdapat 47 KK yang tidak memiliki Akses Jamban keluarga.

Tabel 4.8
Jaringan Saluran Pembuangan Air Limbah

No	Alamat RT/RW	Jumlah KK	Masyarakat memiliki akses jamban	Jumlah Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis
1	Dusun 1	97	162	3
2	Dusun 2	183	66	4

Gambar 4.5
Peta Jaringan Pembuangan Air Limbah Desa Aek Tuhul



c. Jaringan Saluran Pembuang Air Hujan (Drainase)

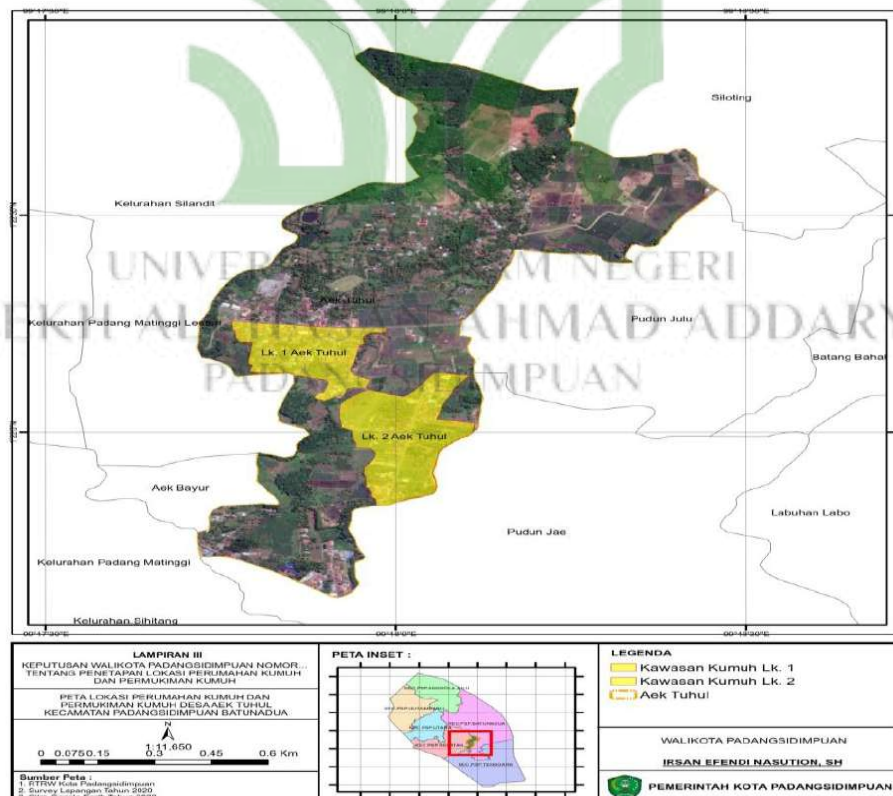
Luas Desa Aek Tuhul 127,96 Ha, desa ini berada di pinggiran kota.

Dengan total panjang Drainase 2250 M, pada musim penghujan luas kawasan yang tergenang air seluas 0 Ha.

Tabel 4.9
Jaringan Saluran Pembuang Air Hujan (Drainase)

No	Alamat RT/RW	Luas Permukiman	Luas area permukiman tidak terjadi genangan air/banjir (ha)	Persentase Kawasan permukiman tidak terjadi genangan air/banjir	Panjang jaringan drainase pada lokasi permukiman memiliki kualitas memadai (meter)	Kondisi jaringan drainase pada lokasi permukiman memiliki kualitas buruk
1	Dusun 1	7,56	0	100%	500	0
2	Dusun 2	4,57	0	100%	0	0

Gambar 4.6
Peta Drainase Desa Aek Tuhul



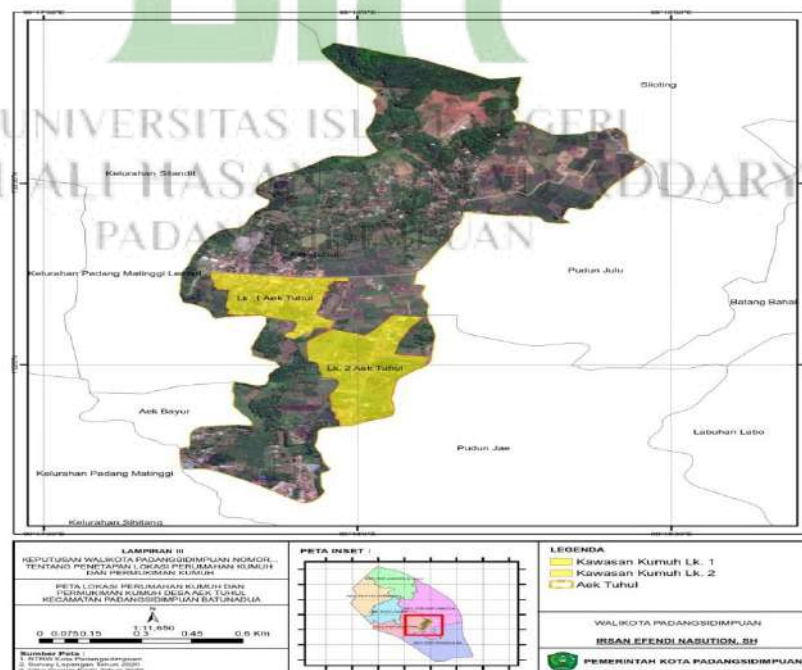
d. Persampahan

Luas Wilayah Desa Aek Tuhul adalah 127,96 Ha, yang terdiri dari 280 Kepala Keluarga tersebar di 2 dusun. Dari jumlah penduduk sebanyak 1210 Jiwa, persoalan persampahan di desa tersebut masih menyisakan persoalan. Sampah rumah tangga belum sepenuhnya terangkut oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Kota Padangsidimpuan.

Tabel 4.10
Persampahan Kelurahan

No	Alamat RT/RW	Jumlah Kepala Rumah Tangga	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR	Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR	Sampah domestik di kawasan permukiman TIDAK terangkut ke TPS/TPA
1	Dusun 1	182	183	163	20	0
2	Dusun 2	92	97	70	27	0

Gambar 4.7
Persampahan Desa Aek Tuhul



8. Sarana Pelayanan Umum dan pemerintahan

Untuk Sarana Pelayanan umum dan pemerintah di Desa Aek Tuhul Kecamatan Padangsidempuan Batunadua terdapat 1 Kantor desa Aek Tuhul, 1 Posyandu, juga terdapat 1 apotik.¹¹⁶

a. Sarana Pendidikan

Sarana Pendidikan di Desa Aek Tuhul Kecamatan Padangsidempuan Batunadua terdapat TK dan SD.

Tabel 4.11
Sarana Pendidikan

No	Dusun	JUMLAH FASILITAS							
		TK	SD	SLT P	SLTA	RA	MI	MTS	MA
1.	Dusun 1	-	1	-	-	-	-	-	-
2.	Dusun 2	1	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah 2021		1	1	-	-	-	-	-	-

b. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan yang terdapat di Desa Aek Tuhul pada tahun 2021 dengan rincinya dapat dilihat di tabel berikut ini :

Tabel 4.12
Sarana Kesehatan

No	Dusun	Rumah Sakit		Posyandu	Puskesmas Pembantu	Balai Pengobatan
		Swasta	Pemerintah			
1.	Dusun 1	-	-	1	1	-
2.	Dusun 2	-	-		-	-

c. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan yang ada di Desa Aek Tuhul tahun 2016 yaitu Masjid, terdapat masjid sebanyak 1 bangunan. Untuk rincian data

¹¹⁶Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) – Aek Tuhul

tentang sarana Peribadatan dapat dilihat di tabel berikut ini :

Tabel 4.13
Sarana Peribadatan

No	Dusun	Mesjid	Mushola	Gereja	Vihara
1.	Dusun 1	1	1	-	-
2.	Dusun 2	1	1	-	-

d. Sarana Perdagangan

Sarana perdangan yang terdapat di Desa Aek Tuhul tahun 2021 dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 4.14
Sarana Perdagangan

No	Dusun	Pasar Tradisional	Minimarket	Grosir	Kios Eceran	Hasil Bumi	Pelelangan Ikan
1.	Dusun 1	-	-	1	3	-	-
2.	Dusun 2	-	-	1	4	-	-

e. Sarana Ruang Terbuka Hijau

Desa Aek Tuhul merupakan daerah yang kepadatan bangunan sangat tinggi. Keberadaan ruang terbuka di wilayah ini sangat tidak memadai untuk dijadikan sarana kegiatan masyarakat. Ruang terbuka memiliki peran, fungsi dan manfaat yang cukup penting dalam memberikan keleluasaan aktivitas.

Peran Ruang Terbuka Hijau

- 1) Sebagai alat pengukur iklim (klimatologis);
- 2) Sebagai penyaring udara kotor (protektif);
- 3) Sebagai tempat hidup satwa (fungsi edaphis);
- 4) Sebagai penunjang keindahan (fungsi estetika);
- 5) Sebagai Sarana edukatif dan sosial; dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 4.15
Ruang Terbuka Publik

No	Lingkungan	RTP
1.	Dusun 1	-
2.	Dusun 2	-

9. Kondisi Rawan Bencana

Bencana menurut UU 24/2007, didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Berdasarkan sumber dan penyebabnya, bencana dibagi atas bencana alam dan bencana non alam dan bencana alam dibagi lagi bencana alam geologi (gempabumi, tsunami, letusan gunung api dan longsor), bencana alam hidroklimatologi (banjir, kekeringan, angin topan, gelombang pasang). Kondisi geologi Kota Padangsidempuan menjadi pengontrol adanya potensi bencana alam geologi berupa bencana alam letusan gunung api, bencana gempa bumi dan potensi bencana gerakan tanah/longsor. Jenis dan potensi ancaman, kerentanan potensi bencana Desa Aek Tuhul dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Banjir

Potensi banjir dapat terjadi di desa Aek Tuhul, walaupun tidak sampai menyebabkan kerugian materi yang besar. Karena lebih kepada genangan di bawah 30 cm. Banjir atau genangan tersebut di pangaruhi oleh :

- 1) Tidak adanya drainase
- 2) Drainase yang lebarnya < 30 cm
- 3) Drainase yang bersidimen tanah dan sampah
- 4) Drainase yang tidak ada saluran akhir (terputus)
- 5) Drainase tersumbat, dan

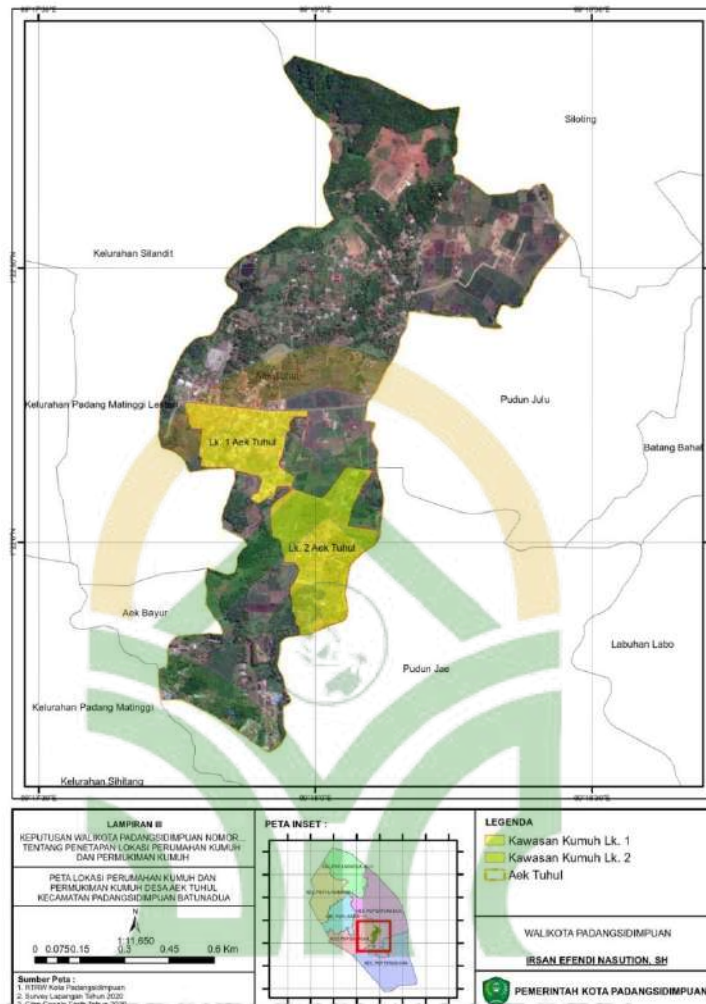
b. Kebakaran

Desa Aek Tuhul merupakan kawasan dengan permukiman yang tidak begitu padat permukiman. Beberapa ruas jalan permukiman dapat dilalui oleh kendaraan roda empat. Akses jalan ke lingkungan untuk mobil kebakaran mudah dilalui kendaraan. Namun minimnya ketersediaan sarana kebakaran seperti hidran atau Apar sebagai pertolongan pertama kebakaran.

c. Gempa

Kota Padangsidempuan, khususnya juga desa Aek Tuhul tidak masuk dalam kategori rawan gempa. Pusat gempa hanya dipengaruhi oleh kabupaten/kota di luar kota Padangsidempuan. Dan kota Padangsidempuan bukan kota yang berada di dekat laut, sehingga potensi Tsunami juga tidak ada.

Gambar 4.8
Peta Rawan Bencana



10. Profil Permukiman dan Permukiman Kumuh

a. Sebaran Permukiman Kumuh Kota/Kab

1) SK Kumuh Terupdate

Dalam Penentuan Desa/Kelurahan Di Kota Padangsidimpuan telah diatur dalam Keputusan Walikota Padangsidimpuan dengan Nomor : 67/KPTS/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Padangsidimpuan 2021.

2) Data Luasan Kumuh

Sesuai dengan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Padangsidimpuan, maka luasan (lokasi) Kumuh sebanyak 60 kawasan di 6 (enam) kecamatan dengan luas 342,17(tiga ratus empat puluh dua koma tujuh belas Hektar , dan tersebar dalam tabel dibawah ini :



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Tabel 4.16

Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Padangsidempuan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
 KUMUH DI KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021

**DAFTAR LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
 DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

No	NAMA LOKASI KAWASAN	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDU KAN		TITIK KOORDINAT		NILAI KUMUH		PERTIMBANGAN LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS
			RT / RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN	JUM LAH	KEPA- DATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TING KAT	NILAI	TINGKAT		
1	Dusun 3 Joring Natobang	1.52	3	Joring Natobang	Padangsidempuan Angkola Julu	154	Rendah	1.451731°	99.260010°	25	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1/3
2	Dusun 2 Joring Natobang	1.24	2	Joring Natobang	Padangsidempuan Angkola Julu	189	Sedang	1.453116°	99.258415°	21	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1/3
3	Dusun 1 Simatohir	3.1	1	Simatohir	Padangsidempuan Angkola Julu	264	Rendah	1.438044°	99.278232°	19	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1/3
4	Simasom	5.95	1, 2, 3	Simasom	Padangsidempuan Angkola Julu	810	Rendah	1.462391°	99.261753°	26	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	B1/2
5	Pintu Langit Jae	2.26	3	Pintu Langit Jae	Padangsidempuan Angkola Julu	301	Rendah	1.471680°	99.248346°	25	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1/3
6	Permukiman Batunadua Julu	7.81	3	Batunadua Julu	Padangsidempuan Batunadua	417	Rendah	1.428305°	99.294555°	32	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1/3
7	Baruas	5.18	2	Baruas	Padangsidempuan Batunadua	249	Rendah	1.391676°	99.306061°	42	KUMUH SEDANG	11	TINGGI	LEGAL	B1/2
8	Siloting	2.52	1	Siloting	Padangsidempuan Batunadua	367	Rendah	1.381930°	99.308042°	31	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1/3
9	Pudun Jae	8.22	2	Pudun Jae	Padangsidempuan Batunadua	837	Rendah	1.357735°	99.302062°	33	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1/3
10	Aek Bayur	4.57	2	Aek Bayur	Padangsidempuan Batunadua	239	Rendah	1.367065°	99.293890°	25	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1/3
11	Batang Bahal	4.42	1, 2	Batang Bahal	Padangsidempuan Batunadua	510	Rendah	1.371465°	99.313898°	33	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1/3
12	Dusun 1 Pudun Julu	15.26	1	Pudun Julu	Padangsidempuan Batunadua	312	Rendah	1.371883°	99.305774°	26	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1/3
13	Dusun 2 Pudun Julu	2.47	2	Pudun Julu	Padangsidempuan Batunadua	219	Rendah	1.372112°	99.309790°	39	KUMUH SEDANG	11	TINGGI	LEGAL	B1/2

No	NAMA LOKASI KAWASAN	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		TITIK KOORDINAT		NILAI KUMUH		PERTIMBANGAN LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITYAS
			RT / RW	KELURAHAN / DESA	KECAMATAN	Jumlah	Kepadatan	Lintang	Bujur	Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat		
32	Lingkungan 3 Lubuk Raya	2.97	3	Lubuk Raya	Padangsidimpuan Hutaimbaru	357	Rendah	1.434877°	99.240025°	27	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1/3
33	Lingkungan 1 Padangmatinggi	4.46	1	Padangmatinggi	Padangsidimpuan Selatan	676	Sedang	1.357251°	99.288280°	23	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3/6
34	Lingkungan 1 Wek V	2	1	Wek V	Padangsidimpuan Selatan	341	Sedang	1.373042°	99.277453°	24	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3/6
35	Lingkungan 6 Wek V	2.24	6	Wek V	Padangsidimpuan Selatan	508	Tinggi	1.379567°	99.273483°	16	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3/6
36	Lingkungan 6 Aek Tampang	2.91	6	Aek Tampang	Padangsidimpuan Selatan	518	Sedang	1.8079787°	99.979809°	21	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3/6
37	Lingkungan 9 Aek Tampang	3	9	Aek Tampang	Padangsidimpuan Selatan	673	Tinggi	1.8079787°	99.979809°	18	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3/6
38	Lingkungan 3 Wek VI	2	3	Wek VI	Padangsidimpuan Selatan	461	Tinggi	1.371682°	99.267935°	21	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3/6
39	Lingkungan 4 Wek VI	8.95	4	Wek VI	Padangsidimpuan Selatan	933	Rendah	1.369141°	99.264888°	16	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3/6
40	Lingkungan 2 Sidangkal	0.9	2	Sidangkal	Padangsidimpuan Selatan	231	Tinggi	1.365697°	99.264860°	19	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3/6
41	Lingkungan 4 Sidangkal	1.7	4	Sidangkal	Padangsidimpuan Selatan	229	Rendah	1.366904°	99.262755°	31	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3/6
42	Kawasan Es Deli	21.49	6	Ujung Padang	Padangsidimpuan Selatan	1489	Rendah	1.362452°	99.277654°	18	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	SEBAGIAN TIDAK LEGAL	C3/6
43	Kawasan Es Deli	12.52	7	Ujung Padang	Padangsidimpuan Selatan	1140	Rendah	1.361412°	99.275798°	27	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3/6
44	Lingkungan 1 Huta Koje	6.52	1	Huta Koje	Padangsidimpuan Tenggara	853	Rendah	1.329081°	99.313241°	22	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3/6
45	Lingkungan 2 Sihitang	5.14	2	Sihitang	Padangsidimpuan Tenggara	618	Rendah	1.34986°	99.291169°	21	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3/6
46	Lingkungan 1 Manegen	1.79	1	Manegen	Padangsidimpuan Tenggara	174	Rendah	1.309281°	99.319072°	32	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3/6
47	Lingkungan 2 Manegen	1.22	2	Manegen	Padangsidimpuan Tenggara	169	Rendah	1.30697°	99.320642°	35	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3/6
48	Labuhan Rasoki	11.29	2	Labuhan Rasoki	Padangsidimpuan Tenggara	646	Rendah	1.325682°	99.343919°	22	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1/3
49	Labuhan Rasoki	7.15	3	Labuhan Rasoki	Padangsidimpuan Tenggara	671	Rendah	1.326264°	99.345395°	25	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1/3
50	Lingkungan 1 Goti	5.44	1	Goti	Padangsidimpuan Tenggara	601	Rendah	1.311246°	99.31946°	24	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3/6

No	NAMA LOKASI KAWASAN	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		TITIK KOORDINAT		NILAI KUMUH		PERTIMBANGAN LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS
			RT / RW	KELURAHAN / DESA	KECAMATAN	JUM LAH	KEPADATAN	LINTA NG	BUJUR	NILAI	TING KAT	NILAI	TINGKAT		
14	Dusun 1 Bargot Topong	1.84	1	Bargot Topong	Padangsidimpuan Batunadua	230	Rendah	1.397146°	99.330714°	47	KUMUH SEDANG	7	SEDANG	LEGAL	B3/5
15	Lingkungan 2,3 Bargot Topong	5.81	2, 3	Bargot Topong	Padangsidimpuan Batunadua	341	Rendah	1.401331°	99.326930°	37	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	B3/5
16	Lingkungan 4,5 Bargot Topong	5.21	4, 5	Bargot Topong	Padangsidimpuan Batunadua	348	Rendah	1.408823°	99.320958°	46	KUMUH SEDANG	7	SEDANG	LEGAL	B3/5
17	Lingkungan 6 Bargot Topong	3.46	6	Bargot Topong	Padangsidimpuan Batunadua	211	Rendah	1.417889°	99.311355°	46	KUMUH SEDANG	7	SEDANG	LEGAL	B3/5
18	Lingkungan 2 Ujung Gurap	20.3	2	Ujung Gurap	Padangsidimpuan Batunadua	369	Rendah	1.398497°	99.301758°	22	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1/3
19	Lingkungan 1 Ujung Gurap	5.38	1	Ujung Gurap	Padangsidimpuan Batunadua	361	Rendah	1.404483°	99.299179°	20	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1/3
20	Lingkungan 1 Aek Tuhul	7.00	1	Aek Tuhul	Padangsidimpuan Batunadua	787	Rendah	1.369381°	99.297944°	21	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3/6
21	Lingkungan 2 Aek Tuhul	11.00	2	Aek Tuhul	Padangsidimpuan Batunadua	423	Rendah	1.366693°	99.300034°	31	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3/6
22	Lingkungan 1 Simirik	3.50	1	Simirik	Padangsidimpuan Batunadua	249	Rendah	1.435258°	99.300847°	20	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3/6
23	Lingkungan 3 Simirik	3.74	3	Simirik	Padangsidimpuan Batunadua	156	Rendah	1.438128°	99.300048°	18	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3/6
24	Tinjoman	1.59	1	Tinjoman	Padangsidimpuan Hutaimbaru	233	Rendah	1.434861°	99.226825°	28	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3/6
25	Partihaman Saroha	2.17	1	Partihaman Saroha	Padangsidimpuan Hutaimbaru	326	Sedang	1.394625°	99.244136°	21	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3/6
26	Huta Padang	9.95	1,2	Huta Padang	Padangsidimpuan Hutaimbaru	1386	Rendah	1.444061°	99.242038°	19	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3/6
27	Hutaimbaru	1.1	7	Hutaimbaru	Padangsidimpuan Hutaimbaru	174	Sedang	1.404186°	99.237961°	24	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3/6
28	Sabungan Jae	4.61	1	Sabungan Jae	Padangsidimpuan Hutaimbaru	314	Rendah	1.413469°	99.244411°	18	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3/6
29	Sabungan Sipabangun	8.67	4	Sabungan Sipabangun	Padangsidimpuan Hutaimbaru	144	Rendah	1.423502°	99.232372°	25	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3/6
30	Sabungan Sipabangun	5.88	5	Sabungan Sipabangun	Padangsidimpuan Hutaimbaru	485	Rendah	1.416633°	99.24135	23	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3/6
31	Lingkungan 1 Lubuk Raya	2	1	Lubuk Raya	Padangsidimpuan Hutaimbaru	277	Rendah	1.440584°	99.233827°	19	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1/3

No	NAMA LOKASI KAWASAN	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		TITIK KOORDINAT		NILAI KUMUH		PERTIMBANGAN LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITY
			RT / RW	KELURAHAN / DESA	KECAMATAN	JUM LAH	KEPADATAN	LINTA NG	BUJUR	NILAI	TING KAT	NILAI	TINGKAT		
51	Lingkungan 1 Salambue	6.92	1	Salambue	Padangsidimpuan Tenggara	872	Rendah	1.332035°	99.306802°	16	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3/6
52	Lingkungan 5 Labuhan Labo	4.61	5	Labuhan Labo	Padangsidimpuan Tenggara	374	Rendah	1.366781°	99.319845°	28	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3/6
53	Lingkungan 2 Pijorkoling	10.21	2	Pijorkoling	Padangsidimpuan Tenggara	1047	Rendah	1.327294°	99.310945°	18	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3/6
54	Bonan Dolok	9.03	2	Bonan Dolok	Padangsidimpuan Utara	769	Rendah	1.400073°	99.261747°	22	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3/6
55	Lingkungan 1 WEK IV	4.63	1	Wek IV	Padangsidimpuan Utara	1075	Tinggi	1.372230°	99.269430°	23	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	SEBAGIAN TIDAK LEGAL	C3/6
56	Lingkungan 2 Wek IV	3.73	2	Wek IV	Padangsidimpuan Utara	651	Sedang	1.374383°	99.270226°	23	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3/6
57	Permukiman Silayang-layang	2.03	5	Wek II	Padangsidimpuan Utara	440	Tinggi	1.380416°	99.267277°	21	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	SEBAGIAN TIDAK LEGAL	C3/6
58	Lingkungan 1 WEK I	5.69	1	Wek I	Padangsidimpuan Utara	1291	Tinggi	1.381380°	99.264993°	30	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3/6
59	Kawasan Aek Batang Ayumi	10.68	1, 2	Kantin	Padangsidimpuan Utara	1129	Rendah	1.370361°	99.275002°	17	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	SEBAGIAN TIDAK LEGAL	C3/6
60	Kawasan Aek Batang Ayumi	13.22	3,8	Wek V	Padangsidimpuan Selatan	1210	Rendah	1.370361°	99.275002°	19	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	SEBAGIAN TIDAK LEGAL	C3/6
TOTAL		342,17													

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MHD. ERWIN

NIP. 19720525 200312 1 006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

IRSAN EFENDI NASUTION

B. Gambaran Umum Program KoTaKu Padangsidimpuan

1. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (RenstraDPUPR) Kota Padangsidimpuan 2019-2024 merupakan target pemerintah daerah agar sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka terjadi penggabungan antara Dinas Pekerjaan Umum dan dan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padangsidimpuan.

Sehingga terjadi perubahan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hal ini diperkuat dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan dan Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 16.A Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.¹¹⁷

Renstra DPUPR adalah perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam jangka 5 (lima) tahun untuk melaksanakan visi misi kota padangsidimpuan.

Selain berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Padangsidimpuan 2019-2024, penyusunan Renstra DPUPR mempertimbangkan pencapaian kinerja Standar Pelayanan Minimal

¹¹⁷Program KOTAKU Padangsidimpuan.

(SPM) bidang kebinamargaan, sumberdaya air, penerangan kota dan penataan ruang, kinerja pelayanan DPUPR dalam periode lima tahun terakhir, serta tantangan dan peluangnya. Pendekatan penyusunan Renstra DPUPR juga mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, memperhatikan keterkaitannya dengan rencana-rencana strategis dinas terkait di tingkat provinsi serta K/L di tingkat pusat serta memperhatikan aspirasi dan masukan para pemangku kepentingan pembangunan di kota Padangsidimpuan.

Untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi kota Padangsidimpuan tersebut perlu dijabarkan kedalam Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai OPD pengampu bidang kebinamargaan, sumberdaya air, PJU dan Penataan Ruang. Dokumen Renstra ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan yang dirumuskan dalam dokumen Rencana Kerja Dinas. Renstra DPUPR disusun untuk periode 2019-2024 sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan RPJMD Kota Padangsidimpuan.

2. Landasan Hukum

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padangsidimpuan Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan perangkat regulasi sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
- c. Undang-undang Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- e. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- f. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padangsidimpuan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- k. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1/PRT/M/2014 Tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- m. Peraturan Walikota Padang Nomor 16.A Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- n. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Tahun 2004 – 2020;
- o. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 109);
- p. Peraturan Daerah Kota Padang nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan tanggal 14 Nopember 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

3. Tujuan Penyusunan Renstra

Adapun target penyusunan rencana strategis dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang kota Padangsidimpuan 2019-2024 antara lain:

- a. Menjelaskan kondisi gambaran tentang pelayanan kebinamargaan, sumber daya air, penerangan kota dan penataan ruang di kota Padangsidimpuan dan kebutuhan penanganannya dalam lima tahun kedepan;
- b. Menguraikan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan bidang-bidang tersebut yang menjadi prioritas pembangunan untuk mendukung pencapaian visi misi;
- c. Sebagai acuan dan bahan evaluasi bagi pencapaian pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di Kota Padangsidimpuan khususnya di bidang kebinamargaan, sumber daya air, penerangan kota dan penataan ruang yang menjadi tupoksi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padangsidimpuan.

4. Susunan Perangkat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan tanggal 14 Nopember 2016, pada pasal 2 huruf d ayat 3 ditetapkan kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Type A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Adapun tugas pokok sebagaimana yang dituangkan didalam peraturan walikota Padangsidimpuan nomor 16.A tahun 2017 tentang susunan kedudukan organisasi dan tugas Fungsi, tata Kelola dinas pekerjaan umum dan adanya Penataan Ruang, adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan tugas pembantuan yang diberikan oleh kepala daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang kota Padangsidimpuan, adapun struktur organisasi pada dinas tersebut yakni:

- a. Sub bagian kepegawaian bidang program dan jasa konstruksi, antara lain :
 - 1) Seksi Perencanaan Program;
 - 2) Seksi evaluasi & pelaporan;
 - 3) Seksi pembinaan jasa konstruksi;
 - 4) Bidang bina marga, terdiri dari :
 - 5) Seksi Jalan;
 - 6) Seksi Jembatan
 - 7) Seksi Peralatan dan alat berat;

- b. Bidang sumber daya air, terdiri dari :
 - 1) Seksi drainase;
 - 2) Seksi jaringan irigasi dan sumber daya air;
 - 3) Seksi rawa pantai dan sungai.
- c. Bidang pemetaan dan tata ruang, terdiri dari :
 - 1) Seksi perencanaan tata ruang kota;
 - 2) Seksi pemetaan dan pengolahan basis data spasial;
 - 3) Seksi perlengkapan prasarana kota.
- d. Bidang tata bangunan dan perizinan, terdiri dari :
 - 1) Seksi perencanaan tata bangunan dan perizinan;
 - 2) Seksi pengarah arsitektur dan konstruksi;
 - 3) Seksi kelayakan bangunan gedung.
 - 4) UPT Irigasi Wilayah I
 - 5) UPT Irigasi Wilayah II
 - 6) UPT Operasional Penerangan Jalan Umum

5. Perangkat Daerah

Perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padangsidimpuan Tahun 2019-2024 dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padangsidimpuan 5 tahun terakhir ini telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara

kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Padangsidimpuan.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Hasil identifikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padangsidimpuan tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padangsidimpuan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padangsidimpuan. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

a. Visi

Visi adalah sebuah impian ataupun cita-cita yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang diakhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha yang dilakukan. Usaha pekerjaan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (*level of living*) masyarakat.

Visi Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJPD Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2019-2024.

Visi, Misi dan Program Walikota Padangsidempuan yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Padangsidempuan merupakan ide dasar dan pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2019-2024.

Memperhatikan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya dan permasalahan yang berkembang di masyarakat, serta berpedoman pada RPJP Kota Padangsidempuan, Visi Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2019 -2023 dirumuskan sebagai berikut :

“Mewujudkan Masyarakat Kota Padangsidempuan Yang Madani Berbasis Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Unggul Serta Berdaya Saing”.

b. Misi

Supaya bisa terlaksana visi kota padangsidimpun dan misi nya maka perlu di lakukan beberapa poin antara lain:

- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif, inovatif dan berdaya saing;
- 2) Mewujudkan Kota Padangsidimpun yang unggul, aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal;
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Padangsidimpun yang inklusif;
- 4) Mewujudkan Kota Padangsidimpun sebagai pusat perdagangan dan ekonomi kreatif;
- 5) Meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan;
- 6) Menciptakan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana.
- 7) Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima.

Dari tujuh misi daerah Kota Padangsidimpun, maka misi yang ke dua dan misi yang ke tujuh, adapun fungsi dan tugas pokok dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang. adalah mewujudkan Kota Padangsidimpun sesuai misi, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan upaya sebagai berikut

- 1) Meningkatkan kinerja dalam penyediaan infrastruktur dan penataan ruang kota.

2) Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk melayani kebutuhan

6. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Program KOTAKU

Program Kotaku berkantor di Desa Aek Tuhul dekat rumah produksi pembuatan keripik sambal. Pelaksanaan kegiatan Program Kotaku dilakukan ada rapat rutin, ada rapat mingguan ada rapat bulanan dan ada rapat tahunan yang disebut rembuk warga tahunan yaitu Rapat Rutin BKM, Arisan BKM, Gotong Royong dan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator BKM Bapak adi purnadi menyatakan bahwa kegiatan Rapat Rutin dilaksanakan seminggu sekali yang dijadwalkan setiap hari Sabtu pukul. 14.00 s.d 17.00.

7. Materi Program Kota Tanpa Kumuh

Kegiatan Pemberdayaan Program Kotaku merupakan salah satu komponen dalam pelaksanaan pendampingan dari komunikator dimana seorang pendamping dapat memberikan berbagai macam materi pemberdayaan pembangunan kepada BKM, misalnya Materi tentang sosial, peningkatan kapasitas BKM, Penguatan Aparat Desa, Materi pengelolaan ekonomi dan pengelolaan lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Adi Purnadi selaku coordinator BKM menyatakan bahwa kegiatan Program Kotaku lebih difokuskan untuk pemberdayaan masyarakat dalam artian bagaimana cara merubah pola pikir masyarakat supaya bisa menjadi lebih baik lagi khususnya dalam memelihara lingkungan, seperti menggalakkan gotong royong minimal 1 kali dalam seminggu.

Hasil wawancara dengan Bapak Adi Purnadi selaku Koordinator BKM beliau menyatakan bahwa:

“ Materi yang di sampaikan kepada kami beragam bila ada pelatihan maupun rapat, yang paling sering di sampaikan terkait transparansi dan keterbukaan dalam segala hal, agar masyarakat bisa melihat dan mengevaluasi kegiatan yang di kerjakan di lapangan karena Program Kotaku berupaya untuk membangun platform (pendekatan) kolaborasi dalam pencegahan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman, sehingga terjadi keterpaduan antar sektor pembangunan untuk Bersama-sama bergerak mewujudkan permukiman layak huni menuju permukiman tanpa kumuh”¹¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdullah selaku pendamping di lapangan beliau menyatakan bahwa:

“Materi dalam Program Kotaku untuk pemda yang paling di butuhkan terkait kolaborasi pemenuhan kebutuhan infrastruktur baik jalan lingkungan, drainase dan air minum bisa terpenuhi, memastikan pemda telah mengalokasikan dana/APBD biaya pemeliharaan Kotaku dan peningkatan kapasitas masyarakat”¹¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amran Hasibuan selaku Kepala Desa beliau menyatakan bahwa”

“Materi Program Kotaku pada masyarakat aek tuhul yang sering di sampaikan tentang pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan, bagaimana cara peningkatan taraf hidup lewat livelihoodnya, memberdayaan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, memanusiakan manusia dan menjaga kerja sama yang baik antara semua pihak baik kelompok peduli, swasta dan pemerintah sehingga permasalahan-permasalahan bisa di atasi”¹²⁰

Hasil penelitian dan wawancara bisa di simpulkan bahwa materi yang ada pada Program Kotaku memang ada 3 paling inti yaitu mulai dari materi tentang Pemberdayaan, Infrastruktur, Sosial dan Ekonomi.

¹¹⁸ Adi Purnadi (Umur 50 tahun) wawancara langsung Koordinator BKM Program KOTAKU Desa Aek Tuhul Kecamatan Padangsidimpuan. Batunadua Kota Padangsidimpuan.

¹¹⁹ Abdullah Sukur (Umur 48 tahun) wawancara langsung Pendamping Program KOTAKU Desa Aek Tuhul Kcamatan Padangsidimpuan. Batunadua Kota Padangsidimpuan.

¹²⁰ Amran Hasibuan (Umur 47 tahun) wawancara langsung Kepala Desa.

C. Temuan Khusus Penelitian

1. Peran Komunikator Dalam Pemberdayaan Masyarakat Program Kotaku Desa Aek Tuhul Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan

Peran komunikator pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padangsidempuan dengan:

- a. Menyusun perencanaan penanganan permukiman kumuh menjadi satu dokumen tingkat kota yang akan menjadi dasar untuk pekerjaan kegiatan.
- b. Mengawasi kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat di lapangan agar sesuai dengan peraturan dan rencana gambar dan proposal.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur baik pembangunan jalan, saluran drainase sehingga bisa memiliki usia panjang ;
- d. Memonitoring pekerjaan di lapangan dan memberikan penguatan-penguatan baik kegiatan ekonomi bergulir, social maupun pelatihan-pelatihan yang ada di Kota Padangsidempuan secara umum.
- e. Menjaga kelestarian permukiman melalui gotong royong dan amal bakti sehingga pola hidup bersih terjaga.
- f. Mensosialisasikan perlunya jaga lingkungan dengan tidak membuang sampah pada saluran drainase maupun ke sungai sehingga tidak tersumbat yang menimbulkan banjir.
- g. Memberikan penguatan kepada pokja PKP maupun Lembaga BKM agar tetap aktif di lapangan dalam hal penuntasan permukiman kumuh dan

menjaga kelestarian lingkungan.

Peran Komunikator juga harus bisa membetuk satu Lembaga yang di sebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Lembaga inilah nantinya yang akan menjadi wadah tempat mengumpulkan informasi-informasi sekaligus yang akan menjalankan roda program kotak, di Desa Aek Tuhul ada 9 orang pimpinan kolektif BKM antara lain:

- a. Adi Purnadi selaku Koordinator BKM
- b. Marisi Ali Said sebagai anggota BKM
- c. Hj. Rosna derita sebagai anggota BKM
- d. Hj. Nursawani sebagai anggota BKM
- e. Ibrahim Solim Harahap sebagai anggota BKM
- f. Suryono sebagai anggota BKM
- g. Dolok Hasibuan sebagai anggota BKM
- h. Hj. Rosmawar sebagai anggota BKM
- i. Nurmalia Harahap sebagai anggota BKM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



Gambar 4.9

Pelaksanaan Pemilu Masyarakat sangat senang dengan adanya pemilihan anggota badan kesewadayaan Masyarakat Deas Aek Tuhul

Dalam pemilihan anggota BKM Harus ada 30% keterlibatan perempuan dan anggota BKM yang terpilih harus sesuai dengan peraturan program kotaku dan di atur secara bersama-sama dengan panitia pemilihan BKM dan masyarakat. Sehingga aturan bersama tentang tata tertib pemilihan anggota BKM bisa di sepakati antara lain:

- a. Wajib berdomisili di lokasi pemilihan minimal 5 tahun
- b. Mempunyai sifat berjiwa relawan
- c. Jujur
- d. Tidak boleh sedarah yang dipilih

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota BKM Desa Aek Tuhul

Bapak Suryono yang bertempat tinggal di Desa Aek Tuhul,

“kami Masyarakat sangat senang dengan Program kotaku masuk ke desa kami aek tuhul. Dimana jalan lingkungan yang sebelumnya rusak

*bahkan tidak memadai menjadi bagus dan adanya pembukaan jalan baru, drainase yang awalnya rusak bisa jadi bagus, sekarang kumuh tuntas dan lingkungan kami bisa jadi asri dan bersih. Harapan kami kepada ibu fasilitator agar bisa tetap memberikan bantuan untuk kepada kami agar bisa ada perbaikan - perbaikan usulan masyarakat sehingga prioritas kegiatan akan semakin banyak yang di butuhkan, alhamdulillah sekarang kegiatan di Desa Aek Tuhul berjalan dengan baik sampai dengan sekarang bisa kita lihat masih berfungsinya rumah produksi, kami berharap agar terus ada bimbingan dari fasilitator agar pemberdayaan bisa berjalan di lapangan”.*¹²¹

Dalam kesempatan yang sama hal senada juga diungkapkan oleh Bapak

Abdullah Sukur selaku tim pendamping Program Kotaku bahwa:

*” Perkembangan Program KOTAKU melalui tahapan yang cukup panjang dan lama, pada awal mulanya program KOTAKU pada bulan april tahun 2008 dimulai tahapan kajian social mapping sekaligus sosialisasi Program KOTAKU, Setelah itu baru muncul relawan-relawan, dan orang inilah nantinya yang akan menjadi pengurus di tingkat desa yang di beri nama BKM (Badan keswadayaan Masyarakat) yang terpilih 9-13 orang, untuk desa aek tuhul hanya 9 orang kenapa harus ganjil bila ada rapat untuk pengambilan keputusan maka harus ada yang ganjil, setelah itu barulah muncul survei lingkungan di mulai dari pengukuran tingkat kekumuhan dilanjutkan dengan pendataan baseline dan survey untuk memastikan kondisi lingkungan baik infrasturukturnya maupun social dan ekonominya yang menjadi kawasan prioritas, sehingga muncul kesepakatan pembangunan kegiatan.Tahapan dilanjutkan dengan penyusunan RAB dan proposal, itulah tugas seorang komunikator harus bisa menjadi informan untuk masyarakat ujar pak sukur”.*¹²²

Hasil wawancara juga dengan Bapak Kepala Desa Aek Tuhul Bapak

Amran Hasibuan beliau mengatakan,

“Salah satu contoh manfaat Kotaku yang paling dirasakan masyarakat adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang saya lihat sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebut saja jalan setapak dan Drainase. Program KOTAKU hadir di Desa Aek Tuhul sejak tahun 2008. Kehadiran Program Kotaku diawali dengan giat gotong royong dan Pelaksanaan Sosialisasi Program KOTAKU.

¹²¹Suryono (Usia 55 tahun) Wawancara langsung, Anggota BKM Desa Aek Tuhul terpilih sebagai Anggota BKM tahun 2021 sampai sekarang

¹²²Abdullah Sukur (Usia 45 tahun) Wawancara langsung, Tim Pendamping Program Kotaku Desa Aek Tuhul Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua bergabung dari tahun 2009

Sosialisasi berjalan dengan baik dan peserta yang hadir sangat antusias dalam hal mendiskusikan Program2 KOTAKU Ke depan, Pemerintah dan Masyarakat akan ikut serta dalam mengawal setiap pelaksanaan kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Tim pendamping Kotaku melaksanakan Sosialisasi Awal tingkat Desa dan penyampaian Proses Perkembangan Kegiatan di Desa, sehingga pihak desa sangat berterima kasih dengan adanya program Kotaku. Menurut pak kades, melalui fasilitasi KOTAKU, jalan-jalan setapak di permukiman penduduk telah dibangun dan diperbaiki. Warga masyarakat sangat merasakan manfaat pembangunan dan perbaikan jalan setapak ini. Pada musim hujan, misalnya, jalan-jalan setapak tidak becek lagi, karena sudah dibuat dari cor beton yang kokoh. Jadi meski hujan, anak-anak yang hendak sekolah tidak takut lagi sepatunya kena tanah becek, kata pak amran selaku kepala Desa Aek Tuhul”.¹²³

Hasil wawancara dengan Bapak Arifin siregar selaku masyarakat

Desa Aek Tuhul yang langsung menerima manfaat dari Program KOTAKU:

“Peran Komunikator di desa kami ini sangat bermanfaat ujar pak Arifin karena merekalah sekarang kampung kami bersih dan tidak banjir lagi, dan Manfaat pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU telah dirasakan langsung baik dari ekonominya maupun sosialnya. Beragam kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan tersebut sudah disesuaikan dengan kebutuhan prioritas warga dalam rangka penanganan kumuh di wilayah Desa kami Penataan kembali yang dulunya kumuh dalam bentuk penyetaraan atas akses dasar sarana dan prasarana permukiman yang tidak layak menjadi layak huni dan menjadi langkah nyata keberadaan Program KOTAKU.

Pendampingan komunikator di Desa Aek Tuhul harus bisa mensosialisasikan enam indikator kumuh utama, ditangani melalui pembangunan sesuai standar teknis yang telah ditetapkan. Yakni mulai dari Jalan Lingkungan, saluran Drainase Lingkungan, pengelolaan Sampah, penyediaan sarana dan prasarana Air Bersih, pengelolaan Limbah Rumah tangga yang langsung masuk danau sehingga perlu penataan berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan sarana mandi, cuci, serta kakus (MCK), hingga Ruang Terbuka Publik (RTP).Seluruh anggaran pembangunan infrastruktur dialokasikan dari Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat Tahun Anggaran 2022. Selain itu tentu, ada dana yang juga diperoleh melalui kolaborasi wilayah penataan kumuh dengan dana bumdes kata pak araifin selaku

¹²³ Amran Hasibuan (Usia 50 tahun) Wawancara langsung, Kepala Deas Aek Tuhul

*masyarakat”.*¹²⁴



Gambar 4.10
Pendampingan Tim Konsultan dalam Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur
Program Kotaku Desa Aek Tuhul Kec.PSP Batunadua

Dari hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa peran Seorang pendamping Program KOTAKU adalah :

- a. Melakukan pendekatan secara personil dan Tim kepada BKM, KSM dan Masyarakat.
- b. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada BKM, KSM dan Simpatisan.
- c. Tim KOTAKU dan BKM Masing-masing membuat Prioritas Kegiatan
- d. Selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Tim Korkot, KMW dan Balai.
- e. Tetap menjalin komunikasi yang baik kepada setiap pihak, BKM, KSM, dan Simpatisan.

¹²⁴Arifin Siregar (Usia 55 tahun) Wawancara langsung, Masyarakat Desa Aek Tuhul Kecamatan P.Sidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan penerima bantuan tahun

- f. Memberikan pendampingan untuk kegiatan baik infrastruktur, social maupun peningkatan ekonomi.

Sebagai seorang pendamping di lapangan juga kita harus bisa mengajak masyarakat agar mau ikut pelatihan, karena di program Kotaku sebelum di buat perencanaan harus di bekali ilmu terlebih dahulu, adapun peserta Pelatihan kali ini terdiri dari aparat desa, anggota BKM, Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP). Pada sesi pertama peserta diajak untuk curah pendapat tentang perencanaan sebagai metode pengajaran mengasah pemikiran dan pengalaman peserta agar bisa saling berbagi pengetahuan dan pengalaman antar peserta.

Lalu peserta diberikan permainan bagaimana membangun team-work melalui permainan edukasi yang disampaikan narasumber dan kemudian dijelaskan tentang pesan yang ingin disampaikan melalui permainan dan metode seperti ini sangat efektif dan diminati peserta disamping dapat mencairkan suasana kaku tetapi juga peserta mudah untuk menangkap pesan , hal ini terlihat dengan banyaknya jawaban beragam dari peserta.

Pada sesi berikutnya peserta mulai diperkenalkan dengan istilah SDG,s ini sangat penting diketahui oleh seluruh pelaku kotaku Desa Aek Tuhul sekalipun bahwa SDGs atau Sustainable Development Goals yang merupakan adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan kearah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, harus komitmen terhadap tidak ada yang tertinggal dan dan untuk mewujudkannya perlu ada

kesadaran dan gerakan bersama dari masyarakat untuk mencapai komitmen SDG,s tersebut.

Materi SDG,s ini sebagai pengantar dalam membuka wawasan bagi peserta melihat kesepakatan global yang kemudian diimplementasikan pada skala lebih kecil di tingkat desa. Pelatihan ini dimaksudkan agar peserta memiliki pemahaman, kemampuan, dan kemauan dalam mengawal pendataan dan perencanaan tingkat masyarakat karena itu materi tentang review dokumen, materi pendataan baseline sangat penting agar peserta paham bagaimana cara melakukan pendataan, pahan tentang perencanaan infrastruktur pengembangan.



Gambar 4.11
Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat, peserta sangat senang dengan adanya pelatihan ini karna akan menambah ilmu bagi BKM

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Program Kotaku Desa Aek Tuhul Kecamatan Padangsidimpuan

Partisipasi masyarakat di desa Aek Tuhul Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua alhamdulillah sangat baik sehingga kegiatan Program Kotaku bisa berjalan dengan lancar sehingga pemberdayaan masyarakat bisa berjalan baik

di buktikan ketika ada pertemuan, masyarakatnya sangat antusias dan Partisipasi masyarakat sangat banyak.

Partisipasi masyarakat menurut Hetifah Sj. Soemarto (2003:78) adalah “proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan - kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka”.

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

Adapun manfaat dari partisipasi masyarakat adalah :

- a. Menuju masyarakat yang lebih bertanggungjawab
- b. Meningkatkan proses belajar
- c. Meminimalisir perasaan terasing
- d. Menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah
- e. Menciptakan kesadaran politik

Ada tiga indikator partisipasi masyarakat menurut Marschall (2006) :

- a. Adanya suatu kelompok-kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat,
- b. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses,

- c. Adanya kegiatan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

Oleh sebab itu partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari kesediaan atau kemampuan anggota masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan. Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan.

Hasil wawancara dengan Ibu Hj.Rosna Derita, beliau anggota BKM Desa Aek Tuhul Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan: menyatakan bahwa:

“Untuk mensukseskan program KOTAKU, perlu partisipasi masyarakat agar apa yang ingin di bicarakan bisa ada kata mufakat, beliau juga mengatakan ketika ada partisipasi masyarakat akan ada kesinambungan antara program KOTAKU dengan masyarakat dan pemerintah daerah sehingga terjadi kolaborasi dalam hal penuntasan kumuh di Desa Ak Tuhul baik dari pembangunan infrastruktur maupun dukungan lainnya. Beliau juga menceritakan bagaimana awal mula program KOTAKU masuk di Desa Ak Tuhul sampai dengan seringnya di lakukan rapat-rapat dalam penentuan kegiatan sehingga Dana Bantuan Program Kotaku benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Beliau juga berharap agar panitia di lapangan memegang prinsip “keterbukaan” dengan selalu mendiskusikan hal-hal kecil sekalipun demi mendapatkan solusi terbaik dan tidak saling menyalahkan ketika timbul permasalahan di tengah masyarakat seperti ketika datangnya bantuan ada saja masyarakat yang tidak suka di perbaiki lingkungan karena mereka berharap uangnya di bagi-bagi, itulah gunanya seorang pemberdaya pembangunan di masyarakat bisa memberikan solusi terbaik kata bu Hj.Rosna selaku anggota BKM Aek Tuhul”.¹²⁵

Hasil wawancara dengan Ibu Rosmalia Harahap, beliau anggota BKM Desa Aek Tuhul menyatakan bahwa:

¹²⁵Hj.Rosna Derita Siregar (Usia 62 tahun) Wawancara langsung, Anggota BKM Desa Aek Tuhul Kecamatan P.Sidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan

“Pala di undang hami rapat mambahas Program Kotaku warga masyarakat Aek Tuhul biasana rame ro harana baen setuju hami kegiatan-kegiatan na adong di Program KOTAKU, baiana kegiatanna selalu di usulkon adalah kebutuhan masyarakat songon pelatihan membuat kripik sambal dohot bia cara mengemasna dohot cara mamasarkonna sude ami di latih sian dinas koperasi bekerja sama dohot BKM aek Tuhul untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, makana menjadi suatu kebanggan di ami di ajari sudena, ima sada keistimewaan desa namion”.¹²⁶

Wawancara dengan Bapak Suryono, beliau anggota BKM Desa Aek

Tuhul menyatakan bahwa:

“Program Kotaku yang saya lihat dalam membuat suatu keputusan terhadap kegiatan tidak serta merta ditetapkan atas keputusan beberapa pihak, tetapi sudah dirembukkan secara bersama-sama oleh perangkat Desa, BKM dan KSM Dan tokoh-tokoh raja selaku badan yang mewakili masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah masyarakat desa untuk memajukan desa sehingga kumuh bisa di atasi secara bersama, Dengan adanya rapat ini di harapkan permasalahan yang akan muncul nanti semakin sedikit sehingga Program Kotaku bisa berjalan dengan baik karena partisipasi masyarakat bagus di Aek Tuhul”.¹²⁷

Dalam kesempatan yang sama wawancara dengan Ibu Siti Adina, beliau pendamping di Desa Aek Tuhul menyatakan bahwa:

“Saya sangat senang melihat sistem kekeluargaan yang mereka ciptakan sangat harmonis, mereka terlihat sangat akrab ketika ada kegiatan-kegiatan. Bahkan mereka tidak sungkan bila ada kegiatan di luar program Kotaku mereka tetap solid. Sampai-sampai kegiatan gotong royong mereka jadwalkan di masjid maupun di sekitaran lingkungan mereka, itu adalah salah satu bukti kerjasama yang mereka tanam bisa berimbas pada kehidupan sehari-hari, Untuk ekonomi bergulirnya sampai dengan sekarang masih berjalan di lapangan dan tetap lancar pengembaliannya itulah tugas seorang pendamping, seperti selogan Program Kotaku berani berubah klo bukan kita siapa lagi”.¹²⁸

¹²⁶Rosmalia Harahap (Usia 35 tahun) Wawancara langsung, Anggota BKM Desa Aek Tuhul Kecamatan P.Sidimpunan Batunadua Kota Padangsidimpunan

¹²⁷Suryono (Usia 47 tahun) Wawancara langsung, Anggota BKM Desa Aek Tuhul Kecamatan P.Sidimpunan Batunadua Kota Padangsidimpunan

¹²⁸Siti Adina (Usia 39 tahun) Wawancara langsung, Pendamping Desa Aek Tuhul Kecamatan P.Sidimpunan Batunadua Kota Padangsidimpunan

Wawancara dengan Pak Sumanto, beliau Unit Pengelola Lingkungan

BKM Desa Aek Tuhul menyatakan bahwa:

“Salah satu cara yang dilakukan untuk menangani kawasan permukiman kumuh adalah dengan mencegah dan meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Hal ini dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan atau memiliki tempat tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 seluas 10.855 Ha.

Pencapaian ini membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda, tidak hanya mengerahkan sumber daya pada satu sektor saja melainkan harus melibatkan sebanyak mungkin pelaku dan sektor baik vertikal maupun horizontal melalui platform “Kolaborasi”. NSUP-Program KOTAKU menekankan peran Pemerintah Daerah sebagai nakhoda yang memegang kunci dalam mengarahkan dan mensinergikan segala bentuk kolaborasi antar pihak untuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, terutama masyarakat sebagai subyek pembangunan yang aktif”.¹²⁹

Wawancara dengan Pak Amran Hasibuan beliau Kades Desa Aek

Tuhul:

“Aparat Desa Aek Tuhul sangat bersyukur dengan semangatnya partisipasi masyarakat bila ada kegiatan program Kotaku, mereka juga sangat aktif ketika dilakukan diskusi-diskusi karena kegiatan ini benar-benar mendukung kebutuhan masyarakat beda dengan program yang lain, sehingga pemda setempat dalam hal penuntasan kumuh siap berkolaborasi agar desa menjadi lebih baik lagi dalam hal penataan lingkungan agar lebih bersih, pala inda ita ise dope pandok ni pak kades hita do nampuna kampung, makana marima ita pa jebes kampungta”.¹³⁰

Hasil wawancara dengan Ibu Nurcahaya, beliau Unit Pengelola

Kuangan BKM Desa Aek Tuhul Kota Padangsidempuan: menyatakan bahwa:

¹²⁹Sumanto (Usia 54 tahun) Wawancara langsung, Unit Pengelola Lingkungan Pendamping Desa Aek Tuhul Kecamatan P.Sidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan

¹³⁰Amran Hasibuan (Usia 47 tahun) Wawancara langsung, kepala Desa Aek Tuhul Kecamatan P.Sidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan



Gambar 4.12
tingginya partisipasi masyarakat bisa di lihat ketika di lakukan rapat sosialisasi

“ Bukti tingginya partisipasi masyarakat bisa di lihat ketika di lakukan rapat sosialisasi pada tanggal 20 maret 2022 masyarakat sangat antusias, apalagi terkait pinjaman ekonomi bergulir bagi masyarakat yang punya usaha menengah ke bawah, masyarakat boleh mengajukan pinjaman berdasarkan prioritas yang membutuhkan, ekonomi bergulir mulai di gulirkan di Desa Aek Tuhul pada Tahun 2010. Pinjaman ekonomi bergulir dengan modal awal 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk 5 kelompok dari bantuan pemerintah pusat dengan 5 orang satu kelompok untuk bisa menyusun proposal agar bisa meminjam, setelah itu baru di survei pendamping usahanya layak atau bagaimana karena harus tanggung renteng sampai sekarang modal yang sudah berkembang sudah hampir 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah) karena adanya kemacetan ketika covid 19, tapi pada tahun 2022 UPK Bersama BKM kembali menggiatkan agar pinjaman ekonomi bisa lancar kembali sehingga dana BKM sekarang sudah bergulir lancar dan bisa di pinjam bagi yang punya usaha kecil-kecilan dalam hal penambahan modal”¹³¹

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas menyatakan bahwa Program

Kotaku bisa menjalin kekeluargaan juga dapat mempengaruhi dalam menarik minat partisipasi masyarakat baik dalam bergotong royong maupun untuk memelihara lingkungannya. Sehingga peran pendamping sangat di butuhkan agar informasi- informasi maupun ide-ide apapun itu bisa sampai kepada

¹³¹ Amran Hasibuan (Usia 47 tahun) Wawancara langsung, kepala Desa Aek Tuhul Kecamatan P.Sidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan

masyarakat lewat komunikator, karena seorang komunikator pembangunan harus bisa memberikan yang terbaik.

D. Analisis Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian ini berlandaskan dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang diperoleh dari lokasi penelitian, terlihat bahwa peran komunikator sangat berperan penting dalam kegiatan program Kotaku Sebagaimana akan diuraikan pada pembahasan hasil penelitian berikut:

1. Peran Komunikator Pembangunan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Program Kotaku Desa Aek Tuhul Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan

Peran Komunikator Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat Program KoTaKu di Desa Aek Tuhul Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan bisa kita lihat bahwa seorang fasilitator harus bisa:

- a. Fasilitasi Pemerintah daerah untuk melaksanakan kolaborasi pemenuhan kebutuhan infrastruktur bidang Watsan;
- b. Fasilitasi dan memastikan Pemerintah daerah telah mengalokasikan dana/APBD untuk pemeliharaan infrastruktur yang dibangun melalui skala Kawasan;
- c. Fasilitasi Pemerintah daerah dan OPD untuk memperkuat Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) memiliki kemampuan teknis pemeliharaan prasarana dan sarana skala lingkungan;
- d. Pengendalian kinerja Fasilitator dan penguatan kelembagaan masyarakat dengan strategi dan rencana kerja yang telah ditetapkan;

- e. Rekapitulasi data hasil kolaborasi dan kelembagaan menyajikan pada aplikasi sim Kotaku;
- f. Fasilitasi proses penyusunan dokumen teknis untuk lokasi yang terdapat kegiatan kolaborasi;
- g. Fasilitasi Pemda dalam menentukan skala prioritas infrastruktur berdasarkan numerik data baseline untuk kegiatan kolaborasi;
- h. Dukungan optimal terhadap Assisten GIS, terkait kolaborasi dan kelembagaan;
- i. Strategi operasional penguatan kapasitas Pemerintah Daerah, Pokja dan Forum PKP Kota/Kabupaten dan BKM;
- j. Fasilitasi keberfungsian Pokja PKP Kabupaten/Kota dan fasilitasi pembentukan forum PKP tingkat kabupaten/kota;
- k. Laporan hasil evaluasi kinerja kelembagaan yang terlibat dalam pelaksanaan program (Pokja PKP dan BKM/LKM) secara berkala;
- l. Strategi operasional pengembangan kolaborasi dalam penanganan kumuh;
- m. Fasilitasi pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan kolaborasi perencanaan, kelembagaan, pendanaan, operasional dan pemeliharaan, termasuk kelembagaan penataan permukiman berkelanjutan serta ter-update dalam SIM;
- n. Fasilitasi terimplementasinya memorandum program, khususnya prioritas pada infrastruktur watsan;

Seorang Fasilitator pembangunan harus bisa menguasai Bahasa daerah

setempat agar mudah di pahami dan menggunakan Bahasa yang enak di dengar orang, santun bicaranya sehingga masyarakat mudah memahaminya karena Bahasa seorang fasilitator sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas didalam hati untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, dan perasaan. Dan sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi.

Adapun peran komunikator harus bisa memberikan informasi agar bisa menjadi penyemangat ketika ada rapat karena memakai berkomunikasi yang baik sesuai prinsip-prinsip komunikasi Islam. Dimana prinsip komunikasi Islam yang digunakan oleh komunikator yaitu prinsip komunikasi *qaulan layyinan*. *Qaulan layyinan* adalah komunikasi dengan menggunakan perkataan yang lembut.

Perkataan yang lembut dalam berkomunikasi akan membantu komunikator untuk menyamaikan pesan kepada masyarakat, dan masyarakat pada umumnya akan merasa senang sehingga maksud dan tujuan dari komunikator akan tercapai. Adapun kelebihan dari prinsip komunikasi Islam *qaulan layyinan* yaitu masyarakat akan merasa senang dan nyaman mendengarkan materi atau komunikasi, dan pesan yang disampaikan akan mudah dipahami oleh lawan bicara.

Masyarakat sangat senang dengan kehadiran komunikator yang sangat ramah, lemah lembut, dan bisa menguasai bahasa kepada masyarakat. Dengan adanya peran fasilitator bukti bila ada kegiatan masyarakat akan datang beramai-ramai untuk mengusulkan kebutuhan mereka sehingga bisa di tamping dalam priritas kegiatan tanpa pilih kasih tapi berdasarkan priorotas mana yangn

paling di segerakan dan dikerjakan. Untuk Desa Aek Tuhul ada 3 orang pendamping lapangannya sebagai fasilitatornya.

E. Keterbatasan Penelitian

Dalam proses melakukan penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, yaitu:

1. Adanya keterbatasan waktu penelitian, tenaga, dan kemampuan peneliti.
2. Adanya kemampuan responden yang kurang memahami pertanyaan pada waktu wawancara dan juga kejujuran ketika menjawab pertanyaan wawancara, sehingga ada kemungkinan hasilnya kurang akurat.
3. Penelitian ini hanya melakukan pengkajian terhadap peran komunikator pembangunan dalam program kotakku saja, sehingga perlu dikembangkan penelitian lebih lanjut untuk meneliti peran komunikator pembangunan yang lain yang belum dikaji.
4. Kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan hanya fokus kepada Koordinator BKM saja, maka diharapkan adanya penelitian yang lebih lanjut mengenai peran komunikator, dan metode yang digunakan komunikator dalam pemberdayaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

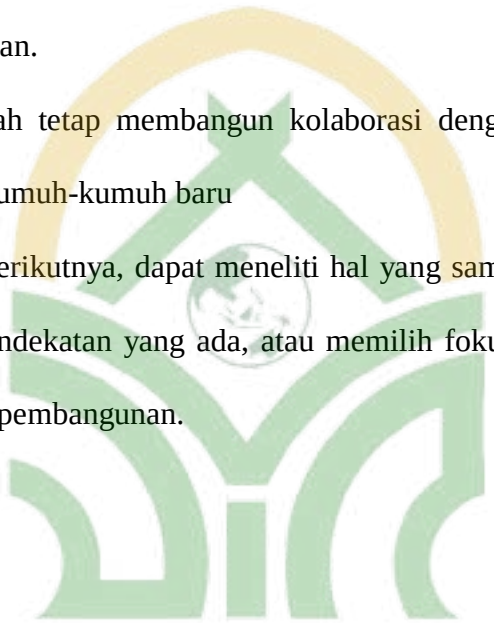
Dari berbagai uraian dan pembahasan tentang Peran Komunikator Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat Program KoTaKu di Desa Aek Tuhul Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran komunikator dalam Program KOTAKU yakni mengentaskan kemiskinan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sistem infrasktruktur dan sanitasi lingkungan dan memberdayakan sosial masyarakat sehingga mampu berkolaborasi mengentaskan pemukiman kumuh
2. Memfasilitasi partisipasi masyarakat desa aek tuhul dalam program KOTAKU
 - a. Memfasilitasi masyarakat agar peningkatan ekonomi meningkat dengan adanya pinjaman bergulir yang tergabung sebagai anggota KSM dengan jumlah pendapatan yang ada sudah banyak perubahan dan masyarakat sudah bisa membeli kebutuhan pokok mereka, dan para anggota yang tergabung kedalam kelompok swadaya masyarakat ini juga sudah bisa membiayai anak-anaknya sekolah, dengan hasil ekonominya.
 - b. Memfasilitasi masyarakat dalam hal memberikan pelatihan kepada masyarakat agar bisa menggali potensi yang ada dalam masyarakat lewat program Kotaku.
 - c. Melakukan sosialisasi kekelompok masyarakat BKM sehingga mereka tetap mendapatkan pengetahuan tentang Program Kotaku,

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran yang perlu di kembangkan yaitu:

1. Bagi Komunikator di lapangan dan anggota BKM agar tetap bisa menjaga kebersihan lingkungan dan melestarikan perberdayaan yang ada di masyarakat Desa Aek Tuhul Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan.
2. Bagi pemerintah tetap membangun kolaborasi dengan masyarakat sehingga tidak muncul kumuh-kumuh baru
3. Bagi peneliti berikutnya, dapat meneliti hal yang sama dengan mempedomani metode dan pendekatan yang ada, atau memilih fokus penelitian pada bagian pemberdayaan pembangunan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, PT. Refika Aditama, Bandung. 2012
- Agus Ahmad Syarfi, "I, *Menejemen Masyarakat Islam*, Bandung: Gerbang Masyarakat Baru, 2004
- Agus Suryono, *Teori dan Isi Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang. UM Press. 2001
- Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Arwini Ramadhani, "*Efektivitas Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kecamatan Tamalate Kota Makassar*, "*Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 8, no. 2, tahun 2019
- Asep Usman Ismail, *Pengelaman Al-Quran Tentang Pemberdayaan Dhu'afa*(Jakarta: Dakwah Press) Cet Ke-1
- Atif Rachmat Ramadhani, dkk., "*Strategi Komunikasi Organisasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Kendari (Studi Komunikator Pada Dinas Purp Kota Kendari Bidang Cipta Karya)*", *Ilmu Komunikasi* 53, no. 9, 2019
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2008
- Chambers, D., Thiekötter, A., & Chambers, L. (2013). Preparing student nurses for contemporary practice: The case for discovery learning. *Journal of Nursing Education and Practice*, 3 (9)
- Djamaluddin Deddy, *Ilmu Komunikasi Teori*, Bandung: Rosda Karya, 2007
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014
- Dian Iskandar Jaelani, *Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya Dan Strategi)*, *Eksyar*, Volume 01, Nomor 01, Maret 2014: 018-034
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT Refika Aditama. Bandung, 2006
- Edi Yuwono, *Handbook Fisiologi Hewan*. Fakultas Biologi. UNSOED. Purwakarta. 2001

Enik Kristiana, *Rencana Penanganan Lingkungan Pemukiman Kumuh Berbasis Kawasan di Kabupaten Rembang*, "Jurnal Arsitektur 01, n0 01, 2018

Gunawan Sumohadiningrat, *Pembangunan Daerah Dan Membangunan Masyarakat*, Jakarta, Bina Rena Pariwisata, 1997

Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Perss, 1998

<http://definisi-program-kotaku>, diakses pada hari Rabu, 12 April 2023, pukul 23.49 WIB.

<http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku>, "Tentang Program Kotaku", Accessed April 4, 2021, diunggah pada 19 Februari 2023, pkl. 09.00 WIB.

<http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku>, "Tentang Program Kotaku", Accessed April 4, 2021, diunggah pada 19 Februari 2023, pkl. 09.00 WIB.

<http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku>, "Tentang Program Kotaku", Accessed April 4, 2021, diunggah pada 19 Februari 2023, pkl. 09.00 WIB.

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=defenisi+pemberdayaan>

J. Wahyu Kusumosusanto "Buku saku Penyelenggara swakelola Kotaku", diterbitkan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, 2022

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, "Jalan-jalan Ke Kotaku Ke Kelurahan Balik Alam", Accessed June 2021

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, " Petunjuk Pelaksanaan Program Kotaku" tahun 2018

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Program Kotaku kota Padangsidimpuan*, 2021

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Dokumen Rencana Penataan lingkungan Pemukiman (RPLP)-Aek Tuhul*

- Matthoriq, dkk, Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang), Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 2, No. 3
- Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003
- Nuruni dan Kustini, Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.7 (1).(2011), diakses pukul 21.00
- Oktarina, dkk., *Komunikasi dalam Perspektif Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Rachmat Kriyantono, *Tehnik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2008
- Suci Handayani, *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi* (Cetakan Pertama). Surakarta: Kompip Solo. 2006
- Suhartini A. Halim, dkk. *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005
- Sumodiningra Gunawan, t. *Kajian Ringkas Tentang Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta: Kompas. 2007
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. 10), Jakarta: Balai Putaka, 1999
- Torang Syamsir, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS DIRI

Nama : NURHALIMAH NASUTION
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Parlampungan/11 Juli 1983
Alamat : Gang Persatuan
Lingkungan IV Kelurahan Sihitang Kecamatan
Padangsidempuan Tenggara Kota
Padangsidempuan

II. ORANGTUA

Ayah : Usuluddin Nasution
Ibu : Nuralina Nasution
Alamat : Desa Muara Parlampungan Kecamatan Btg Natal
Kabupaten Mandailing Natal

III. SUAMI/ANAK

Suami : Nizamuddin Banurea
Anak : - Imo Khairul Azmi Banurea
- Kirana Risky Niati Banurea
- Sohna fadillah Banurea

IV. PENDIDIKAN

- 1) SD Indpres Muara Parlampungan Tahun 1989 s/d 1995
- 2) MTSs Purba Baru Tahun 1996 s/d 1999
- 3) Mass Purba Baru Tahun 1999 s/d 2002
- 4) SI Fakultas Usuluddin Jurusan Aqidaf Filsafat UIN Sumut Tahun 2002 s/d 2006
- 5) S2 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Tahun 2021 s/d 2023

Lampiran
Pelatihan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Aek Tuhul 15 Februari 2022



Rapat BKM Desa Aek Tuhul 23 Februari 2022





Sosialisasi Fasilitator Kepada Masyarakat Desa Aek Tuhul perlunya menjaga kebersihan 23 Maret 2023



BKM Aek Tuhul dapat bantuan dari dinas koperasi pengolahan ubi 20/06/2022



BKM aek Tuhul Dapat Bantuan Mesin Pengolahan Ubi Masyarakat

Koordinator BKM Desa Aek Tuhul Bersama Kadis Koperasi dan Tim Fasilitator
Survei rumah produksi 15 Januari 2023



Pembangunan Rumah Produksi Desa Aek Tuhul 2 September 2021



**DAFTAR HADIR
RAPAT PERSIAPAN READNESS DAN CRITERIA SERTA MASTER PLAN**

Hari/Tgl: Kamis, 29 Des 2021
Tempat: Kantor BAPPEO

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KEHAR PADAS MUDA HASIBUANISI	KABID KAWASAM PERMUKIMAN	
2	M. Hally A.	Pl. H.A. Perking	
3	Nurhaini NIS	Asst IC	
4	Mikhaery. Baunudin Is	P. Teknik	
5	Kiman R. Siregar	F- MK	
6	Kura O. Lulis	Kabid. P. Pan	
7	Mon. Bati	Fungsion	
8	ARMAN ARDI	SENIOR TASKEL	
9	RIENELDA DANI SYANTY	STAF BID. PERUMAHAN	
10	Asri Sari	Staf Bid. e Gov	
11	Asli. Asis. NIS	Dinas. Kecekman	
12	Yuni. Kalsum	BAPPEO	
13	Winda P.	Kabid. Perumahan	
14			
15			
16			
17			
18			

LEMBAR PENGESAHAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASANUDDIN ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

TELAH DISAHKANNYA
REVISI DOKUMEN RENCANA PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN (RPLP)
BKM MAJU JAYA
DESA AEK TUHUL
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA
KOTA PADANGSIDIMPUAN

Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Desa Aek Tuhul telah disusun secara partisipatif oleh masyarakat Desa Aek Tuhul yang berkolaborasi dengan Kelompok Peduli dan Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalui serangkaian rembuk warga.

Padangsidimpuan, Nopember 2021

Kepala Desa Aek Tuhul



(.....)

BKM MAJU JAYA



(.....)

Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPPI)



(.....)

Tim Fasilitasi KOTAKU



(.....)

Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) - Aek Tuhul